

**ANALISIS BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) MELALUI PROGRAM
PENGEMBANGAN DESA EMAS (ENTREPRENEUR, MANDIRI, ADIL DAN
SEJAHTERA) TERHADAP MASYARAKAT SEKITAR WISATA BROMO,
KECAMATAN SUKAPURA, KABUPATEN PROBOLINGGO**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh :

Wahyu Ningsih Qomariyah
NIM.E20182062

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
2023**

**ANALISIS BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) MELALUI PROGRAM
PENGEMBANGAN DESA EMAS (ENTREPRENEUR, MANDIRI, ADIL DAN
SEJAHTERA) TERHADAP MASYARAKAT SEKITAR WISATA BROMO,
KECAMATAN SUKAPURA, KABUPATEN PROBOLINGGO**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah

Oleh:

Wahyu Ningsih Qomariyah
NIM. E20182062

Disetujui Pembimbing



Muhammad Saiful Anam, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197111142003121002

**ANALISIS BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) MELALUI PROGRAM
PENGEMBANGAN DESA EMAS (ENTREPRENEUR, MANDIRI, ADIL DAN
SEJAHTERA) TERHADAP MASYARAKAT SEKITAR WISATA BROMO,
KECAMATAN SUKAPURA, KABUPATEN PROBOLINGGO**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Ekonomi Syariah

Hari : Rabu
Tanggal : 13 Desember 2023

Tim Penguji

Ketua Sidang



SOFIAH. M.E.
NIP. 199105152019032005

Sekretaris



FATIMATUZZAHRO, SHI.M.SEI
NIP: 199508262020122007

Anggota :

1. Dr. UBAIDILLAH. M.Ag.
2. M. SAIFUL ANAM. S.Ag., M.Ag.



Menyetujui.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Ubaidillah, M.Ag.
NIP. 196312261996031001

PERSEMBAHAN

1. Bapak Supat dan Ibu Endang Wahyuni selaku orang tua yang selalu memberikan kasih sayang, semangat, perjuangan nasehat yang tiada henti yang penuh kesabaran dan keikhklasan, membesarkan dan membiayai tanpa ada kata lelah dan mengeluh, baik berupa materil maupun spritual serta mengalir doa untuk kebahagiaan putrinya ini di dunia maupun kelak di akhirat nanti dan keberhasilannya mencapai cita-cita serta harapan yang lebih baik.
2. Kakakku tercinta, terkasih dan tersayang yang selalu menyemangati, mendengarkan keluh kesah saya, dan memberi solusi atas masalah yang terjadi serta saya juga bisa belajar dari pengalaman beliau.
3. Seluruh teman kelas saya Ekonomi Syariah angkatan 2018.
4. Dosen-dosen FEBI yang telah memberikan ilmu kepada saya, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat sebagai bekal kehidupan di dunia maupun di akhirat.
5. Almamater tercinta UIN KHAS JEMBER yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu.

KATA PENGANTAR

Segenap Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, kemudahan dan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan guna mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak atas bantuan, bimbingan, petunjuk dan saran-saran, serta nasehat yang tidak ternilai harganya. Ucapan terima kasih penulis haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Hefni, S.Ag., M.M., CPEM. Selaku rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Bapak Dr. H. Ubaidillah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
3. Ibu Dr. Hj. Nurul Widyawati I.R., S.Sos., M.Si selaku Wadep 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
4. Dr. M.F. Hidayatullah , S.H.I, M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam
5. Ibu Sofiah, M.E. Selaku Koordinator Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

ABSTRAK

Wahyu Ningsih Qomariyah, Muhammad Saiful Anam, S.Ag., M.Ag. 2023:
Analisis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Melalui Program Pengembangan Desa EMAS (Entrepreneur, Mandiri, Adil dan Sejahtera) terhadap Masyarakat Sekitar Wisata Bromo, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo

Kata Kunci: BUMDes, Program DESA EMAS, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional, desa memegang peranan sentral sebagai agen pemerintah yang berada di garis terdepan, mampu menjangkau kelompok sasaran yang benar-benar menjadi fokus upaya peningkatan kesejahteraan. Upaya tersebut juga dilakukan oleh pemerintah Desa Ngadisari yang terus melakukan inovasi dalam mengembangkan perekonomian masyarakat setempat dengan memanfaatkan adanya BUMDes serta peluang ekonomi dengan keberadaan wisata Bromo. Kolaborasi akan BUMDes serta peluang yang dimiliki desa perlu diperhatikan betul agar dapat dioptimalkan sehingga fokus penelitian ini tertuju pada bagaimana dampak kolaborasi tersebut pada perekonomian masyarakat setempat. Penelitian ini dilakukan untuk menyelidiki sejauh mana pengaruh BUMDesa melalui inisiatif pengembangan Desa Emas serta evaluasi keberhasilan program tersebut dalam memberdayakan ekonomi masyarakat Desa Ngadisari. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Desa Emas memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pelatihan yang diselenggarakan oleh Program Desa Emas, terutama dalam bidang pemasaran jasa, menjadi aspek yang paling mencolok. Masyarakat Desa Ngadisari telah menerima pelatihan dalam pembuatan pamflet dan strategi pemasaran melalui media sosial. Keahlian ini membantu mereka mengembangkan usaha kecil dan jasa terkait pariwisata Bromo, seperti homestay, penyediaan makanan, dan layanan lainnya.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Batasan Masalah.....	8
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kajian Teori	14
1. Badan Usaha Milik Desa	14
2. Pemberdayaan Masyarakat.....	20
3. Program Desa Emas	30
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Pendekatan dan jenis penelitian	34
B. Lokasi Penelitian.....	35
C. Subjek penelitian.....	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	41
A. Gambaran Objek Penelitian	41
B. Kondisi Ekonomi	45

1. Pekerjaan Utama.....	46
2. Analisis Wisata Bromo pada Ekonomi Masyarakat.....	47
C. Analisis Program Desa EMAS terhadap Ekonomi Masyarakat.....	51
1. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	51
2. Program Desa EMAS	56
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pernyataan Keaslian Tulisan

Lampiran 2 : Matrik Penelitian

Lampiran 3 : Pedoman Penelitian

Lampiran 4 : Surat Izin Penelitian

Lampiran 5 : Surat Selesai Penelitian

Lampiran 6 : Jurnal Kegiatan Penelitian

Lampiran 7 : Surat Keterangan Turnitin

Lampiran 8 : Surat Keterangan Selesai Bimbingan Skripsi

Lampiran 9 : Biodata Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan entitas sosial hukum yang terstruktur berdasarkan asal usul yang khas, mengakar pada prinsip hak-hak turun-temurun yang bersifat istimewa. Fundamentalisasi konsep pemerintahan desa mencakup elemen-elemen seperti keberagaman, partisipasi, otonomi lokal, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan pemerintahan di tingkat desa dianggap sebagai suatu subsistem dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan. Oleh karena itu, desa memiliki wewenang untuk mengelola dan mengurus urusan masyarakatnya. Kepala desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan diwajibkan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Desa memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum, baik yang bersifat publik maupun perdata, serta memiliki kepemilikan terhadap aset berupa kekayaan, harta benda, dan bangunan. Selain itu, desa juga tunduk pada hukum pidana dan perdata, sehingga dapat menjadi penggugat atau tergugat di pengadilan. Oleh karena itu, kepala desa, dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa, memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum dan menjalin perjanjian yang saling menguntungkan.¹

¹ Widjaja H.A.W, *Otonomi Daerah Merupakan Otonomi Yang Bulat Dan Utuh* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).

Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah, keberhasilannya sangat tergantung pada kesiapan pemerintah daerah dalam menyusun sistem pemerintahannya dengan tujuan menciptakan pembangunan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta melibatkan partisipasi masyarakat secara optimal dalam pelaksanaan pemerintahannya. Hal ini sesuai dengan mandat Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menekankan pentingnya menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Governance*) dalam konteks pembangunan daerah yang bersifat desentralistik dan demokratis.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional, desa memegang peranan sentral sebagai agen pemerintah yang berada di garis terdepan, mampu menjangkau kelompok sasaran yang benar-benar menjadi fokus upaya peningkatan kesejahteraan. Hal ini diwujudkan melalui pembentukan sebuah entitas hukum yang disebut Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 mengenai badan usaha milik desa. Permendagri tersebut menegaskan bahwa "keuangan pemerintah desa dalam menjalankan tugas pemerintahannya serta upaya peningkatan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi di pedesaan dapat ditingkatkan melalui pendirian badan usaha milik desa yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi setempat." BUMDes adalah suatu

badan usaha yang dibentuk oleh pemerintah desa, di mana kepemilikan dan pengelolaan modalnya dilakukan bersama oleh pemerintah desa dan masyarakat.²

Dengan merujuk pada UU No. 12 Tahun 2008 mengenai perubahan terhadap UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, pentingnya kepemimpinan daerah yang efektif menjadi krusial dalam memastikan keberhasilan peraturan daerah. Oleh karena itu, peran desa sebagai entitas pemerintahan dan bagian integral dari kesatuan masyarakat hukum adat menjadi sangat signifikan dan strategis. Sebagai entitas pemerintahan, desa berfungsi sebagai ujung tombak dalam penyediaan layanan kepada masyarakat. Di sisi lain, sebagai entitas kesatuan masyarakat hukum adat, desa meneguhkan dirinya sebagai fondasi yang kokoh dalam sistem kemasyarakatan bangsa Indonesia. Hal ini menjadikan desa sebagai landasan yang krusial untuk pembangunan sistem politik, ekonomi, sosial-budaya, serta hankam yang stabil dan dinamis. Oleh karena itu, desa dapat dianggap sebagai representasi dan contoh yang sangat baik untuk mengamati dengan cermat interaksi antara pemerintah dan masyarakatnya. Melalui desa, implementasi badan usaha milik desa dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan desa yang bersumber dari peraturan daerah.³ BUMDes diharapkan dapat memacu dan menggerakkan dinamika perekonomian di wilayah pedesaan. Aset ekonomi yang terdapat di desa seharusnya dikelola secara optimal oleh warga desa itu sendiri. Prinsip dan konsep dasar BUMDes harus mencerminkan

² Coristya Berlian Ramadana and Heru Ribawanto, "KEBERADAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) SEBAGAI PENGUATAN EKONOMI DESA (Studi Di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang) Coristya," *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 1, no. 6 (2010): 1068–76.

³ Ramadana and Ribawanto.

semangat kebersamaan dan swadaya sebagai upaya untuk memperkuat dimensi ekonomi dalam struktur kelembagaannya. Pada tahap ini, BUMDes diharapkan akan berperan aktif dalam mendukung upaya peningkatan sumber-sumber pendapatan asli desa, serta menggalang kegiatan ekonomi masyarakat dengan perannya sebagai lembaga sentral yang memberikan perlindungan.⁴

Destinasi pariwisata Gunung Bromo berlokasi di Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Analisis data kunjungan wisatawan selama periode 2018 hingga 2020 mencatat jumlah pengunjung sebanyak 159.780 pada tahun 2018, 169.186 pada tahun 2019, dan mengalami penurunan drastis menjadi 44.012 pada tahun 2020. Penurunan tersebut dapat diterangkan oleh dampak penyebaran virus Covid-19, yang mengakibatkan pembatasan aktivitas pengunjung. Pada tahun 2020, tidak terdapat kunjungan pariwisata domestik dari bulan April hingga Juli, sementara kunjungan wisatawan asing tidak terjadi sejak bulan April hingga Desember. Sebagai akibatnya, terjadi signifikan penurunan jumlah pengunjung pada tahun 2020.⁵

Perkembangan ekonomi di suatu daerah dapat dipicu oleh peningkatan produktivitas dan pendapatan dalam kegiatan ekonomi yang sudah ada, yang disebut sebagai intensifikasi. Namun, perkembangan tersebut juga dapat terjadi melalui peningkatan produktivitas dan pendapatan sebagai hasil dari munculnya kegiatan ekonomi baru, yang dikenal sebagai ekstensifikasi. Sementara pengembangan ekonomi di pedesaan telah menjadi fokus program-program

⁴ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemeritahan Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011).

⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo, *Kecamatan Sukapura Dalam Angka 2021* (Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo, 2021).

pemerintah selama periode yang panjang, hasilnya belum sepenuhnya memenuhi harapan. Gagalnya implementasi program-program tersebut dapat diatributkan pada berbagai faktor, salah satunya adalah intervensi atau campur tangan pemerintah yang terlalu mendalam, yang cenderung menghambat inovasi dan kreativitas masyarakat desa dalam mengelola roda perekonomian mereka.⁶ Pentingnya Wisata Bromo bagi penduduk Kecamatan Sukapura tidak dapat diabaikan, mengingat dampak positifnya terhadap peningkatan perekonomian lokal. Melalui keberadaan wisata ini, masyarakat setempat dapat memperoleh pendapatan tambahan yang nantinya dapat diarahkan sebagai sumber dana untuk meningkatkan kondisi pembangunan di desa. Dalam konteks ini, implementasi program Desa EMAS (*Entrepreneur, Mandiri, Adil, dan Sejahtera*) dapat menjadi salah satu strategi yang relevan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi dan memperbaiki kesejahteraan desa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat judul ***Analisis Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Melalui Program Pengembangan Desa EMAS (Enterpreneur, Mandiri, Adil dan Sejahtera) Terhadap Masyarakat Sekitar Wisata Bromo, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo***. Alasan penulis mengambil judul ini karena penulis ingin mengetahui seberapa jauh peran BUMDes dan keberhasilan program pengembangan desa EMAS dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Sukapura, Kecamatan Probolinggo.

⁶ Suparmoko, *Ekonomi Publik: Untuk Keuangan Dan Pembangunan Daerah* (Yogyakarta: ANDI, 2002).

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam karya tulis ini adalah:

1. Bagaimana analisis BUMDes melalui program pengembangan Desa EMAS (*Entrepreneur*, Mandiri, Adil dan Sejahtera) terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat disekitar wisata Bromo Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo?
2. Bagaimana keberhasilan program pembangunan desa EMAS (*Entrepreneur*, Mandiri, Adil dan Sejahtera) dalam mengembangkan ekonomi masyarakat Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, tujuan penelitian dari karya tulis ini adalah:

1. Untuk menganalisis BUMDes melalui program pengembangan Desa EMAS (*Entrepreneur*, Mandiri, Adil dan Sejahtera) terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat disekitar wisata Bromo Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo.
2. Untuk mengetahui keberhasilan program pembangunan desa EMAS (*Entrepreneur*, Mandiri, Adil dan Sejahtera) dalam mengembangkan ekonomi masyarakat Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari dilaksanakannya penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini, dimaksudkan dapat memperkaya wawasan dan sebagai pengembangan dalam bidang keilmuan terkait pengaruh BUMDes terhadap perekonomian sekitar serta analisis dan keberhasilan program pembangunan desa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman, wawasan serta dapat membandingkan beberapa teori yang peneliti dapat dari bangku perkuliahan dengan realita yang ada di lapangan.

b. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi penambah wawasan bagi masyarakat sekitar tentang baiknya mengikuti program pembangunan desa serta mengetahui peran BUMDes bagi perekonomian masyarakat.

c. Bagi Instusi

Dari hasil penelitian ini dimaksudkan dapat memberi kontribusi baru yang bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi tambahan bagi mahasiswa dan lembaga UIN KHAS Jember khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah dalam pengembangan karya tulis ilmiah.

pinjaman. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat unsur riba dalam kegiatan BUMDes Batetangnga tersebut.⁷

Studi lanjutan yang dilaksanakan oleh Adriani Sari pada tahun 2017 bertajuk "Pengaruh BUMDes Terhadap Pengembangan Ekonomi Desa di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai" menyoroti peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai lembaga yang aktif dalam ranah sosial dan ekonomi, khususnya dalam penyediaan layanan terhadap masyarakat desa dalam bidang usaha. Metode penelitian yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif dengan karakteristik deskriptif, memfokuskan pada dua aspek utama: (1) kehadiran BUMDes dan (2) perubahan pendapatan masyarakat sebelum dan setelah keberadaan BUMDes.

Hasil penelitian menunjukkan kesesuaian keberadaan BUMDes dengan regulasi yang berlaku di Kabupaten Serdang Bedagei, yang kemudian diatur lebih lanjut oleh peraturan desa terkait BUMDes. Hasil analisis menunjukkan nilai t-hitung sebesar -6,925 dengan nilai probabilitas (Sig) 0.000. Dengan nilai probabilitas (Sig) yang lebih rendah dari taraf signifikansi 0.05, maka hipotesis nol (H_0) ditolak, mengindikasikan adanya pengaruh yang signifikan antara periode sebelum dan sesudah keberadaan BUMDes. Implikasinya, BUMDes memiliki dampak yang kuat terhadap perkembangan ekonomi di tingkat desa.

⁷ Hartini, "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Batetangnga Kab. Polman" (Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2019).

Dari hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa kehadiran BUMDes berperan sangat penting dalam memajukan ekonomi desa.⁸

Penelitian berjudul "Peran dan Efektivitas Badan Usaha Milik Desa dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat" yang dilakukan oleh Nikmah Solohati mengaplikasikan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam konteks masyarakat dinilai sebagai upaya yang baik, meskipun belum mencapai tingkat optimal. Fungsi BUMDes mencakup pengembangan potensi desa melalui pemanfaatan lahan pertanian dan Sumber Daya Manusia (SDM) desa, peningkatan usaha rumah tangga, penyediaan lapangan pekerjaan, serta peningkatan aspek sosial masyarakat. Meskipun tingkat efektivitas BUMDes dinilai cukup berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan, namun demikian, masih terdapat ruang untuk peningkatan optimalitas.⁹

Penelitian selanjutnya yang dilaksanakan oleh Eka Cahyani, Ahmad Guspul, dan Ratna Wijayanti pada tahun 2019 dengan judul "Analisis Pengaruh BUMDes dalam Menopang Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo (Studi Empiris Pada Bumdes Silatri Indah Desa Beran dan BUMDes Skrikandi Desa Ropoh)" memiliki tujuan untuk melakukan analisis terhadap peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mendukung kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah.

⁸ Adriani Sari, "Pengaruh BUMDes Terhadap Pengembangan Ekonomi Desa Di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Begadai" (Universitas Sumatera Utara, 2017).

⁹ Nikmah Sholihati, "Peran Dan Efektivitas Badan Usaha Milik Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020).

Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini, dengan fokus pada Desa Beran (BUMDes Silatri Indah) dan Desa Ropoh (BUMDes Srikandi). Penelitian ini melibatkan tiga perspektif, yaitu pemerintah, pengelola BUMDes, dan masyarakat Kepil. Kegiatan terakhir dalam penelitian ini adalah mengevaluasi dampak keberadaan BUMDes terhadap kesejahteraan masyarakat di Kepil.

Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan BUMDes memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat Kepil secara umum, dan secara khusus bagi Desa Beran dan Desa Ropoh. Dalam konteks peningkatan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat, program dan kinerja BUMDes terbukti berkontribusi positif dalam memajukan pembangunan di Desa Beran dan Ropoh.¹⁰

Penelitian berikutnya, yang dilaksanakan oleh Saniyah dengan judul "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Menurut Perspektif Ekonomi Islam," menggunakan metode penelitian lapangan untuk menyajikan temuan bahwa peran BUMDes Kilu Angkon di Desa Sukaraja Ulu Krui telah memberikan kontribusi yang memadai dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, meskipun belum mencapai tingkat optimal. Terdapat ketidakseimbangan dalam tingkat kesejahteraan antar masyarakat di Desa Sukaraja Ulu Krui. Kendala-kendala yang diidentifikasi melibatkan kurangnya

¹⁰ Eka Cahyani, Ahmad Guspul, and Ratna Wijayanti, "Analisis Pengaruh BUMDes Dalam Menopang Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo (Studi Empiris Pada Bumdes Silatri Indah Desa Beran Dan BUMDes Skrikandi Desa Ropoh)," *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)* 1, no. 1 (2019).

modal, pengetahuan masyarakat, dan kinerja serta manajemen BUMDes Kilu Angkon yang belum optimal. Dalam konteks pandangan ekonomi Islam, meskipun demikian, masyarakat Desa Sukaraja Ulu Krui masih dapat dianggap sejahtera karena telah memenuhi kebutuhan al-dharuriyyah (primer), al-hajjiyyah (sekunder), dan al-thsaniyyah (pelengkap).¹¹

Penelitian berikutnya, yang dilakukan oleh Sangrila Puspita Dewi pada tahun 2020, berjudul "Dampak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Pandansari, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi". Tujuan dari penelitian ini mencakup tiga aspek, yakni (1) untuk memberikan deskripsi mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pandansari, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi; (2) untuk memberikan deskripsi mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Pandansari, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi; (3) untuk menilai pengaruh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Pandansari, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi. Populasi penelitian melibatkan 75 warga atau anggota masyarakat yang tergabung dalam Bansdes Desa Pandansari Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi. Metode pengumpulan data melibatkan penggunaan angket dan dokumentasi. Dalam analisis data, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif kuantitatif, analisis regresi sederhana, dan uji hipotesis (uji t). Hasil temuan penelitian melibatkan tiga aspek, yaitu (1) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pandansari,

¹¹ Saniyah, "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Menurut Perspektif Ekonomi Islam" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi dinilai sebagai lembaga yang berkinerja baik; (2) Tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Pandansari, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi juga dinilai baik; (3) Terdapat pengaruh yang signifikan antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Pandansari, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi.¹²

B. Kajian Teori

1. Badan Usaha Milik Desa

a. Pengertian Badan Usaha Milik Desa

Menurut definisi yang tercantum dalam Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang kemudian disingkat sebagai BUMDes, merupakan suatu entitas usaha yang kepemilikan modalnya secara keseluruhan atau sebagian besar dimiliki oleh entitas Desa melalui penyertaan modal secara langsung, yang bersumber dari kekayaan Desa yang telah dipisahkan, dengan tujuan untuk mengelola aset, menyediakan jasa pelayanan, dan mengelola usaha lainnya, dengan tujuan utama mencapai kesejahteraan maksimal bagi masyarakat Desa.¹³

Didirikan dengan tujuan utama untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD), BUMDes menjadi pilar ekonomi di pedesaan. Keberhasilannya dalam mencapai tujuan ini memicu dukungan positif dari Pemerintah Desa, yang menyadari peran strategis BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan

¹² Sangrila Puspita Dewi, "Pengaruh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Pandansari Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi," *Sosial: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 21, no. 1 (2020).

¹³ Herry Kamaroesid, *Tata Cara Pendirian Dan Pengelolaan BUMDES* (Jakarta: Mitra Wacana media, 2015).

penduduk desa. Sebagai entitas ekonomi di pedesaan, BUMDes perlu membedakan diri dari lembaga ekonomi komersial, dan karakteristiknya mencakup kepemilikan bersama oleh desa, modal yang berasal dari desa dan masyarakat, dan operasionalisasinya yang mengakar pada budaya lokal. Berfokus pada potensi lokal dan hasil informasi pasar, keuntungan yang diperoleh oleh BUMDes diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat, sejalan dengan kebijakan desa. Fasilitasi dari Pemerintah Pemrov, Pemkab, dan Pemdes, serta pengendalian bersama oleh Pemdes, BPD, dan anggota, menjadikan BUMDes sebagai entitas ekonomi yang terintegrasi dengan kebijakan lokal dan tujuan kesejahteraan masyarakat desa.¹⁴

BUMDes, sebagai entitas ekonomi, menginisiasi modal usahanya berdasarkan inisiatif masyarakat dan prinsip kemandirian. Hal ini mengindikasikan bahwa pembiayaan modal usaha BUMDes berasal dari partisipasi masyarakat. Meskipun demikian, disamping sumbangan masyarakat, BUMDes memiliki potensi untuk mengajukan pinjaman modal kepada pihak eksternal, seperti Pemerintah Desa atau lembaga lain, bahkan melalui perantara pihak ketiga. Dengan merujuk pada uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa BUMDes merupakan sebuah badan yang dibentuk secara kolektif oleh masyarakat dan pemerintah desa, dengan pengelolaannya

¹⁴ Amalia Sri Kusuma Dewi, "Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa," *Journal of Rural and Development* 5, no. 1 (2014).

dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat, bertujuan untuk meraih keuntungan bersama sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa.

b. Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diatur dengan ketentuan yang tertuang dalam beberapa dokumen hukum. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur secara rinci mengenai pembentukan BUMDes dari Pasal 87 hingga Pasal 90. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa turut menetapkan aturan terkait BUMDes, khususnya di Pasal 132 sampai Pasal 142. Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa diatur oleh Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, meliputi Pasal 88 dan Pasal 89. Terakhir, pendirian dan pengurusan BUMDes diatur lebih lanjut oleh Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015. Semua ketentuan ini menjadi landasan hukum yang mengatur secara komprehensif pendirian dan pengelolaan BUMDes sesuai dengan prinsip dan tujuan pembangunan desa dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

c. Tujuan dan Fungsi BUMDes

Berdasarkan Permendes Nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran BUMDes, BUMDes memiliki tujuan untuk:

- a) Meningkatkan perekonomian desa
- b) Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa
- c) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa
- d) Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga
- e) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga
- f) Membuka lapangan kerja
- g) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, dan Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.¹⁵

¹⁵ Kadek Sumiasih, "Peran Bumdes Dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata," Jurnal Magister Hukum Udayana 7, no. 4 (2018).

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mencerminkan implementasi dari manajemen ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kolaboratif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius agar administrasi BUMDes dapat berjalan dengan efektif, efisien, profesional, dan mandiri.

Dalam mencapai tujuan BUMDes, langkah-langkah diambil dengan memenuhi kebutuhan masyarakat, baik yang bersifat produktif maupun konsumtif, melalui penyediaan barang dan jasa yang dikelola bersama oleh masyarakat dan Pemerintah Desa (PemDes). Upaya ini diarahkan untuk tidak memberikan beban berat kepada masyarakat, mengingat peran BUMDes sebagai motor utama dalam menggerakkan ekonomi desa. Selain itu, BUMDes diharapkan mampu memberikan pelayanan kepada non-anggota, termasuk mereka yang berasal dari luar desa, dengan menetapkan harga dan standar pelayanan sesuai dengan pasar umum. Hal ini menunjukkan adanya mekanisme kelembagaan dan peraturan bersama yang disepakati, sehingga aktivitas BUMDes tidak menimbulkan distorsi ekonomi di lingkungan pedesaan.

d. Peran Badan Usaha Milik Desa

Seyadi menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki peran krusial sebagai sarana untuk pembangunan dan pengembangan kemampuan ekonomi masyarakat desa, dengan tujuan

utama meningkatkan kesejahteraan baik secara ekonomi maupun sosial. BUMDes secara aktif berkontribusi dalam memperkuat kualitas kehidupan masyarakat, menjadi landasan yang memperkuat ketahanan ekonomi pada tingkat nasional, dan berusaha untuk memperbaiki serta mengembangkan perekonomian di lingkungan desa. Melalui perannya, BUMDes menjadi faktor penting dalam membantu masyarakat desa meningkatkan pendapatan mereka, dengan harapan menciptakan kemakmuran di tengah-tengah masyarakat desa.

Dari definisi tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa Badan Usaha Milik Desa memiliki peran yang signifikan, salah satunya adalah memberikan dorongan untuk mengoptimalkan potensi, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia. BUMDes juga berperan dalam menciptakan semangat wirausaha di lingkungan desa, mengingat pengelola dan karyawan yang terlibat dalam BUMDes berasal dari masyarakat desa itu sendiri. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa BUMDes memiliki kapasitas untuk meningkatkan tingkat perekonomian desa secara keseluruhan.¹⁶

¹⁶ Seyadi, Bumdes Sebagai Alternatif Lembaga Keuangan Desa (Yogyakarta: UPP STM YKPN, 2003).

2. Pemberdayaan Masyarakat

a. Konsep pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan kemandirian dan swadaya masyarakat di tingkat bawah, memperkuat posisi tawar mereka terhadap tekanan dalam berbagai bidang dan sektor kehidupan. Konsep pemberdayaan masyarakat desa dapat diartikan melalui dua perspektif. Pertama, pemberdayaan diartikan sebagai usaha untuk menegaskan posisi berdiri masyarakat, tidak lagi dianggap sebagai obyek penerima manfaat yang bergantung pada bantuan luar, melainkan sebagai subjek yang bertindak secara mandiri. Meskipun bergerak secara mandiri, masyarakat tetap memiliki tanggung jawab terhadap negara, dengan layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, perumahan, dan transportasi tetap menjadi tugas negara. Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan menunjukkan ketersediaan ruang dan kapasitas untuk mengembangkan potensi kreatif, mengontrol lingkungan dan sumber daya mereka sendiri, menyelesaikan masalah secara independen, serta ikut berperan dalam proses politik di tingkat nasional. Dengan turut serta dalam pembangunan dan tata kelola pemerintahan, masyarakat menjadi elemen aktif dalam pembentukan masa depannya.¹⁷

Pemerintah, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten, melakukan pemberdayaan masyarakat melalui beberapa strategi. Pertama,

¹⁷ Sutoro Eko, "Pemberdayaan Masyarakat Desa," in *Diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa* (Samarinda: Badan Diklat Provinsi Kaltim, 2002).

pemberdayaan dilakukan dengan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi tepat guna, dan inovasi baru untuk mendorong kemajuan ekonomi dan pertanian di lingkungan masyarakat desa. Kedua, peningkatan kualitas pemerintahan dan masyarakat desa diperjuangkan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan. Ketiga, pemerintah mengakui serta memanfaatkan institusi-asli yang telah ada dalam masyarakat desa.

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan suatu tindakan untuk meningkatkan tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengembangan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan hakikat permasalahan dan kebutuhan utama masyarakat desa. Pemberdayaan ini menekankan pada proses delegasi sebagian kekuasaan, daya, atau kemampuan kepada masyarakat, dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas individu agar lebih mampu mengatasi berbagai tantangan. Pemberdayaan juga merupakan suatu proses yang merangsang, mendorong, atau memotivasi individu agar memiliki keterampilan atau kekuatan untuk mengambil keputusan sesuai dengan pilihan yang mereka tentukan.¹⁸

Pemberdayaan melibatkan proses dan visi yang mencapai tingkat ideal. Dari segi proses, masyarakat sebagai subjek melakukan tindakan kolektif untuk mengembangkan potensi kreatif, memperkuat posisi tawar,

¹⁸ Arif Purbantara and Mujiyanto, Modul KKN Tematik Desa Membangun Pemberdayaan Masyarakat Desa (Kementerian Desa Ombangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2019).

dan mencapai kedaulatan. Dari perspektif visi ideal, tujuan proses tersebut adalah menciptakan kondisi di mana masyarakat memiliki kemampuan dan kemandirian untuk mengekspresikan pendapat, mendapatkan akses, dan mengendalikan lingkungan, komunitas, sumber daya, serta relasi sosial-politik dengan negara. Proses menuju visi ideal ini seharusnya tumbuh dari inisiatif masyarakat sendiri, namun dalam konteks struktural yang tidak seimbang, masyarakat seringkali menghadapi kesulitan dalam membangun kekuatan internal, sehingga memerlukan "intervensi" dari luar.¹⁹

Kehadiran pihak eksternal, seperti pemerintah, LSM, organisasi masyarakat sipil, organisasi keagamaan, perguruan tinggi, dan lain-lain, di dalam komunitas bukanlah untuk memberikan perintah, mengkurui, atau mengambil keputusan, tetapi lebih sebagai fasilitator (katalisator) yang mempermudah, menggerakkan, mengorganisir, menghubungkan, memberikan ruang, mendorong, merangsang, dan sebagainya. Hubungan antara komunitas dan pihak eksternal tersebut seharusnya bersifat sejajar, saling percaya, saling menghormati, terbuka, dan bersifat saling belajar untuk tumbuh dan berkembang bersama.

Pemberdayaan masyarakat menekankan prioritas terhadap partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengembangan kontrol publik terhadap pelaksanaan keputusan-keputusan yang bersifat umum. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat

¹⁹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: Refika Aditama, 2005).

menekankan pada pentingnya dimensi politik. Dimensi politik dalam konteks pemberdayaan masyarakat merupakan implementasi konkret dari aspek politik, terutama melalui integrasi demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengadopsi prinsip demokrasi musyawarah mufakat, setiap warga desa memiliki kesempatan untuk turut serta dalam proses pembangunan sesuai dengan konteks kehidupan mereka. Dengan demikian, demokrasi memberikan ruang partisipatif bagi anggota masyarakat guna melindungi dan memajukan kepentingan mereka.²⁰

b. Dasar hukum pemberdayaan masyarakat

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menggambarkan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, dengan dasar prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 2 dan Pasal 5 menegaskan bahwa Desa berfungsi sebagai pelaksana Pemerintahan Desa, penyelenggara Pembangunan Desa, pembina kemasyarakatan Desa, serta pemberdayaan masyarakat Desa. Ini dilaksanakan dengan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Desa merupakan bagian integral dari Pemerintahan Daerah, membentuk struktur desa sebagai gabungan fungsi

²⁰ Ibid

komunitas swadaya dan pemerintahan otonom setempat. UU Desa Pasal 4 mendorong inisiatif, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa dalam mengembangkan potensi dan aset desa untuk meningkatkan kesejahteraan bersama, menggarisbawahi kapasitas desa untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan terhadap masyarakatnya.²¹

c. Prinsip dan asas pemberdayaan masyarakat desa

Undang-Undang Desa mengatur organisasi desa sebagai penggabungan fungsi komunitas pemerintahan sendiri (self-governing community) dan pemerintahan sendiri tingkat lokal (local self-government). Organisasi tersebut diharapkan dapat menyelaraskan kesatuan masyarakat hukum, yang merupakan dasar dari keragaman Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain itu, pengaturan mengenai desa dalam Undang-Undang Desa didasarkan pada prinsip-prinsip yang mencakup:

1. Pengenalan, merujuk pada pengakuan terhadap hak asal-usul;
2. Prinsip subsidiaritas, mencakup penetapan kewenangan yang bersifat lokal dan pengambilan keputusan pada tingkat lokal untuk kepentingan masyarakat desa;
3. Pluralitas, menggambarkan pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat desa, dengan tetap

²¹ Yulianus Nardin, "Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Bumdes," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)* 8, no. 3 (2019): 140–45.

memperhatikan nilai-nilai bersama dalam konteks kehidupan nasional dan negara;

4. Solidaritas, menunjukkan semangat aktif dan kerjasama antara lembaga di tingkat desa dan elemen masyarakat desa, dengan prinsip saling menghargai, dalam upaya membangun desa;
5. Gotong-royong, mengacu pada praktik saling bantu-membantu untuk pembangunan desa;
6. Kekeluargaan, mencakup norma-norma kehidupan warga masyarakat desa sebagai bagian dari kesatuan keluarga besar masyarakat desa;
7. Musyawarah, sebagai proses pengambilan keputusan yang melibatkan diskusi dengan berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam masyarakat desa;
8. Prinsip demokrasi, mengacu pada sistem pengorganisasian masyarakat desa dalam kerangka sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa atau melalui persetujuan masyarakat, dengan menghormati harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa;
9. Kemandirian, sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka dengan sumber daya yang dimiliki sendiri;

10. Partisipasi, menunjukkan keterlibatan aktif warga desa dalam suatu kegiatan;
11. Kesetaraan, mengacu pada kesamaan kedudukan dan peran warga desa;
12. Pemberdayaan, sebagai upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa;
13. Keberlanjutan, merujuk pada proses terkoordinasi, terintegrasi, dan berkelanjutan dalam merencanakan serta melaksanakan program pembangunan desa. Tujuan dan strategi pemberdayaan masyarakat

Tujuan dari upaya pemberdayaan masyarakat adalah memberikan kapasitas dan kemandirian kepada masyarakat, terutama dalam mengatasi tantangan kemiskinan serta keterbelakangan, kesenjangan, dan ketidakberdayaan. Kemiskinan dapat diidentifikasi melalui indikator ketidakcukupan atau tidak terpenuhinya kebutuhan dasar, yang melibatkan aspek-aspek seperti pangan, pakaian, perumahan, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Sementara itu, keterbelakangan mencakup aspek-aspek seperti produktivitas yang rendah, ketidakmampuan sumber daya manusia, keterbatasan akses tanah meskipun ketergantungan pada sektor pertanian tetap signifikan, dan penurunan pasar-pasar lokal atau tradisional akibat orientasi pada perdagangan internasional. Dengan kata

lain, tantangan keterbelakangan melibatkan aspek struktural (kebijakan) dan budaya.²²

Ada beberapa strategi yang dapat menjadi pertimbangan untuk dipilih dan kemudian diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat.²³

1. Menciptakan iklim, memperkuat daya, dan melindungi.
2. Program Pembangunan Pedesaa
3. Strategi gotong royong
4. Strategi pembangunan teknikal-profesional
5. Strategi konflik
6. Strategi pembelotan cultural

Pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan oleh berbagai entitas, seperti pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, pers, partai politik, lembaga donor, aktor-aktor masyarakat sipil, atau oleh organisasi masyarakat lokal itu sendiri. Diantara elemen-elemen tersebut, birokrasi pemerintah memegang peranan strategis yang signifikan karena memiliki keunggulan dan kekuatan yang luar biasa dibandingkan dengan entitas lainnya. Keunggulan tersebut mencakup ketersediaan dana, jumlah aparat yang besar, kewenangan untuk merancang kerangka legal, serta peran dalam menetapkan kebijakan terkait pemberian layanan publik. Proses pemberdayaan akan mencapai tingkat keberhasilan yang lebih

²² Sunyoto Usman, *Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).

²³ J. Nasikun, *Mencari Suatu Strategi Pembangunan Masyarakat Desa Berparadigma Ganda, Dalam Jefta Leibo, Sosiologi Pedesaan* (Yogyakarta: Andi Offset, 1995).

tinggi, bersifat komprehensif, dan berkelanjutan apabila berbagai entitas tersebut membentuk kemitraan dan jaringan yang didasarkan pada prinsip saling percaya dan menghormati.²⁴

Dalam konteks pembentukan Kelompok Pemberdayaan Masyarakat (KPM) di setiap desa, kolaborasi antara KPM dan pemerintahan desa perlu ditingkatkan guna bersama-sama melaksanakan upaya pemberdayaan masyarakat. Apabila kemitraan ini berhasil mempercepat perkembangan ekonomi masyarakat, akan berperan efektif dalam fungsi pemerintahan desa (sistem politik lokal), integritas kepemimpinan lokal (elit lokal), dan partisipasi aktif masyarakat.²⁵ maka kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan akan dapat terwujud.

Secara umum, pemberdayaan dalam konteks pembangunan melibatkan pemberian wewenang untuk meningkatkan posisi sosial, ekonomi, budaya, dan politik masyarakat setempat, sehingga mereka dapat berperan secara signifikan dalam upaya pembangunan. Memahami pentingnya memprioritaskan proses pembangunan yang memberdayakan masyarakat, partisipasi aktif dari masyarakat menjadi suatu keharusan untuk menjaga kelangsungan proses pembangunan itu sendiri. Konsep ini sejalan dengan pandangan Uphoff (sebagaimana diungkapkan oleh Cernea), yang menekankan pentingnya menyesuaikan perencanaan dan implementasi program dengan kebutuhan serta kapasitas penduduk yang

²⁴ Eko, "Pemberdayaan Masyarakat Desa."

²⁵ Kutut Suwondo, *Civil Society Di Aras Lokal: Perkembangan Hubungan Antara Rakyat Dan Negara Di Pedesaan Jawa* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar & Percik, 2005).

diharapkan dapat mengambil manfaat dari program tersebut. Hal ini bertujuan agar penduduk tidak hanya dianggap sebagai "kelompok sasaran" tetapi lebih sebagai "pemanfaat yang diharapkan," yang akan memperoleh keuntungan sesuai dengan kebutuhan dan kapabilitas mereka. Pemberdayaan, baik sebagai proses maupun tujuan, pada dasarnya akan membawa dampak positif dengan meningkatkan keberanian individu atau kelompok. Meskipun demikian, sebagai suatu konsep baru dalam konteks pembangunan, pemberdayaan masyarakat juga dapat menimbulkan berbagai konsekuensi atau dampak.

Pada suatu waktu, terdapat pemahaman bahwa pemberdayaan masyarakat seringkali diarahkan ke tingkat bawah, di mana bantuan material dianggap lebih vital daripada keterampilan teknis dan manajerial. Dalam konteks ini, upaya pemberdayaan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar dan dukungan finansial, dengan keyakinan bahwa hal tersebut lebih penting daripada peningkatan keterampilan dan pengetahuan teknis serta manajerial. Selain itu, terdapat pandangan bahwa teknologi yang diperkenalkan dari luar dianggap lebih efektif dibandingkan dengan teknologi yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Keyakinan ini muncul dari asumsi bahwa teknologi dari luar memiliki kemajuan dan daya saing yang lebih tinggi, sehingga dianggap sebagai solusi yang lebih potensial untuk memajukan masyarakat. Perspektif ini menggambarkan kepercayaan pada konsep "modernitas" teknologi luar sebagai jalan terbaik untuk membawa perubahan positif.

Selanjutnya, ada pandangan yang menyatakan bahwa lembaga-lembaga yang telah ada dan berkembang di kalangan masyarakat dianggap tidak efisien, bahkan dianggap sebagai penghambat proses pembangunan. Dalam konteks ini, lembaga-lembaga tersebut dianggap kurang dimanfaatkan dan tidak mendapatkan upaya yang memadai untuk diperbaharui, diperkuat, dan diberdayakan. Akibatnya, potensi lembaga-lembaga tersebut tidak maksimal, dan kurangnya usaha untuk memperbaharui dapat menghambat kemajuan dan perkembangan masyarakat.²⁶

3. Program Desa Emas

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) menjalankan peran krusial dalam mengembangkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 sebagai instrumen utama untuk mendukung pelaksanaan Visi Indonesia Emas 2045. Tindakan ini ditempuh sebagai upaya sistematis untuk merintis dan mendorong pencapaian visi nasional yang ambisius, yakni menjadikan Indonesia sebagai "Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan". Dalam konteks ini, Kementerian PPN/Bappenas mengakui urgensi suatu panduan strategis yang dapat memandu pembangunan nasional menuju pencapaian tujuan jangka panjang. Proses penyusunan RPJPN dianggap sebagai kerangka kerja esensial yang memberikan landasan

²⁶ HAW Widjaja, *Pemerintahan Desa/Marga* (Jakarta: Raja Grafindo, 2001).

konseptual bagi implementasi kebijakan pembangunan yang mendukung realisasi visi nasional. Komitmen Kementerian PPN/Bappenas terletak pada pemeliharaan integritas, kredibilitas, dan akuntabilitas dalam seluruh tahapan penyusunan dan pelaksanaan RPJPN, sebagai wujud dari dedikasi terhadap pencapaian visi besar dan tujuan nasional.²⁷

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) menggariskan sasaran-sasaran utama yang bersifat ambisius dan holistik, mencerminkan tekad untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang berpendapatan per kapita setara dengan negara maju. Sasaran ini menjadi pilar utama dalam perencanaan pembangunan, diiringi dengan upaya mencapai kemiskinan nol persen dan pengurangan ketimpangan sosial. Selain itu, RPJPN mengejar peningkatan kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di dunia internasional, menggambarkan komitmen untuk berperan aktif dalam arena global.

Sasaran-sasaran lainnya mencakup peningkatan daya saing sumber daya manusia, yang mencerminkan kesadaran akan peran krusial manusia sebagai aset utama pembangunan. Dengan fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, RPJPN bertujuan menghasilkan tenaga kerja yang mampu bersaing secara global. Pentingnya keberlanjutan juga tercermin dalam sasaran-sasaran RPJPN, khususnya dalam menanggapi isu perubahan iklim. Pencapaian target penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GKR) hingga mencapai net zero emissions menunjukkan keseriusan Indonesia dalam berkontribusi terhadap penanganan perubahan iklim secara global.

²⁷ Sekretariat RPJPN, “Indonesia EMAS 2045,” 2023.

Salah satu langkah yang signifikan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan adalah melalui pembentukan Program Desa EMAS (*Entrepreneur*, Mandiri, Adil, dan Sejahtera). Program ini dirancang sebagai inisiatif holistik untuk menggalang potensi ekonomi dan sosial di tingkat desa, dengan fokus pada empat pilar utama yang terwakili dalam akronim EMAS.

Aspek "*Entrepreneur*" dari Program Desa EMAS bertujuan untuk mendorong semangat kewirausahaan di kalangan masyarakat desa. Dengan memberikan dukungan dalam pengembangan keterampilan dan peningkatan kapasitas pengusaha lokal, program ini menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan usaha dan inovasi di tingkat desa.

"Mandiri" merujuk pada aspek kemandirian ekonomi dan sosial desa. Program ini merancang langkah-langkah konkret untuk meningkatkan ketahanan ekonomi desa melalui diversifikasi sumber daya dan peningkatan akses terhadap pasar. Kemandirian juga mencakup pengembangan infrastruktur dasar dan layanan publik yang diperlukan.

Prinsip "Adil" dalam Program Desa EMAS mencerminkan komitmen terhadap pemberdayaan seluruh lapisan masyarakat desa, termasuk kelompok yang rentan. Upaya peningkatan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan pelibatan perempuan dalam proses pembangunan adalah beberapa aspek yang menjadi fokus untuk mencapai keadilan sosial di tingkat desa.

Terakhir, aspek "Sejahtera" menekankan pencapaian kesejahteraan holistik bagi masyarakat desa. Program ini memandang kesejahteraan tidak hanya dari segi ekonomi, tetapi juga melibatkan dimensi kesehatan, pendidikan, dan

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian menurut Sugiyono merupakan cara ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan data dengan tujuan serta kegunaan tertentu.²⁸ Pengertian tersebut merujuk pada empat kata kunci utama, yakni cara ilmiah, data, tujuan serta kegunaan. Berdasarkan hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa metode penelitian merupakan sebuah cara ilmiah yang dipilih untuk memproses sebuah data untuk digunakan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk dapat melakukan penelitian terkait Pengaruh BUMDes Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Pengembangan Desa EMAS (*Entrepreneur*, Mandiri, Adil dan Sejahtera) di Wisata Bromo, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, maka akan dilakukan beberapa teknik dan metode sebagai berikut:

A. Pendekatan dan jenis penelitian

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian ini bertumpu pada pengumpulan dan interpretasi data dalam bentuk deskripsi naratif untuk menggambarkan fenomena yang diteliti. Berbeda dengan pendekatan kuantitatif yang menggunakan data berupa angka, penelitian ini fokus pada penyampaian fakta dan penggambaran keadaan yang dapat diamati, dirasakan, dan dialami di lapangan tanpa adanya rekayasa.²⁹

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta CV, 2015).

²⁹ D Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010).

Jenis penelitian yang diterapkan adalah metode deskriptif, di mana hubungan antar variabel akan dieksplorasi melalui satu kali uji relasi. Metode ini digunakan untuk menyajikan fakta-fakta tanpa analisis angka, melainkan dengan memberikan gambaran menyeluruh tentang keadaan yang terkait. Dalam konteks ini, peneliti bertujuan untuk memahami dan menggambarkan hubungan antara variabel pengaruh BUMdes sebagai variabel bebas dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai variabel terikat, tanpa menggunakan asumsi atau analisis statistik.

B. Lokasi Penelitian

1. Tempat penelitian

Tempat penelitian merupakan batasan wilayah dimana peneliti akan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan selama penelitian. Tempat penelitian yang dipilih oleh peneliti dalam penelitian akan dilaksanakan di Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia. Lokasi ini dipilih sebagai tempat penelitian karena desa ini merupakan desa terdekat dengan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.

2. Waktu penelitian

Waktu penelitian ditetapkan akan dilakukan pada semester ganjil 2022/2023 dengan rincian tahapan berikut:

a. Tahap persiapan

Tahap ini dilakukan pada 13 Pebruari 2023

b. Tahap pelaksanaan

Tahap ini dilakukan pada 8 Maret 2023

c. Tahap penyelesaian

Tahap ini dilakukan pada 23 Mei 2023

C. Subjek penelitian

Subjek penelitian ini merujuk pada sumber data serta kualifikasi jenis data yang akan dilaporkan oleh peneliti. Subjek penelitian dapat pula disebut sebagai informan dimana peneliti dapat menentukan jenis data dan siapa saja informan yang dibutuhkan oleh peneliti. Berkaitan dengan kebutuhan data, peneliti memilih masyarakat di desa Ngadisari dengan beberapa kualifikasi berikut:

1. Masyarakat desa Ngadisari yang bersedia menjadi informan,
2. Berusia di atas 17 tahun,
3. Memiliki usaha,
4. Bermata pencarian yang berkenaan dengan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.

Seluruh penduduk dengan kualifikasi tersebut akan menjadi populasi penelitian. Sedangkan sampel penelitian akan ditentukan berdasarkan jumlah populasi. Jika populasi berjumlah lebih dari 100 maka akan dilakukan penarikan sampel dengan menggunakan rumus slovin.

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Di mana:

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = persen kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan pengambilan sampel yang dapat ditolerir atau diinginkan, penelitian ini mengambil persen kelonggaran 5%.

Jika sampel berjumlah kurang dari 100 maka keseluruhan populasi akan menjadi keseluruhan sampel penelitian.

D. Teknik pengumpulan data

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan mendatangi langsung lokasi pebelitian. Data yang diperoleh dari observasi merupakan hasil data yang diambil oleh peneliti berdasarkan hasil pengamatan lapangan. Data ini dapat berupa lembar check list, buku catatan, foto, video dan sejenisnya yang dapat mendukung jalannya penelitian. Dalam melakukan observasi, peneliti hanya bertindak sebagai pengamat, dengan demikian peneliti tidak terliba langsung dalam kegiatan yang dilakukan oleh informan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti akan melakukan tanya jawab dengan inroman untuk mendapatkan informasi yang

diterapkan atau dipindahkan ke konteks lain dengan karakteristik serupa. Dengan menggabungkan metode ini, penelitian kualitatif ini membangun dasar yang kokoh untuk meningkatkan keabsahan dan keandalan data serta memperkaya pemahaman terhadap fenomena yang diteliti.

F. Analisis data

Analisis data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan melalui pendekatan interpretatif untuk memahami makna dan konteks dari informasi yang terkumpul. Proses analisis dimulai dengan pengkodean terbuka, di mana unit-unit data yang relevan diidentifikasi dan dikategorikan untuk membentuk kerangka kerja awal. Setelah itu, dilanjutkan dengan pengkodean terfokus yang menitikberatkan pada tema-tema kunci dan pola yang muncul dari data. Analisis dilakukan secara terus-menerus, dengan peneliti secara aktif terlibat dalam pembentukan konsep dan interpretasi.

Selama analisis, dilakukan pencarian konvergensi dan divergensi dalam data, dengan mencari hubungan antara tema-tema yang muncul. Pemeriksaan mendalam terhadap konteks dan situasi di lapangan juga dilibatkan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena yang sedang diteliti. Selain itu, strategi triangulasi digunakan untuk membandingkan temuan dari berbagai sumber data guna memastikan keakuratan interpretasi.

Selama proses analisis, mempertahankan fleksibilitas dan terbuka terhadap perubahan kerangka analisis menjadi prinsip utama. Hasil analisis data ini nantinya akan diartikulasikan dalam temuan-temuan utama, diperkuat dengan

kutipan langsung dari partisipan penelitian untuk memberikan keautentikan pada interpretasi yang dihasilkan. Dengan pendekatan analisis yang teliti dan mendalam, penelitian kualitatif ini berupaya untuk mengungkapkan esensi dan kompleksitas fenomena yang menjadi fokus penelitian.

G. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini mencakup beberapa bab yang merinci alur diskusi penelitian. Bab satu, pendahuluan, membahas latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah. Bab dua, kajian pustaka, mencakup review penelitian terdahulu dan kajian teori terkait pengaruh BUMDes melalui program desa EMAS terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Selanjutnya, bab tiga membahas metode penelitian, termasuk pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian. Bab empat memuat penyajian data dan analisis, termasuk gambaran objek penelitian, presentasi data, analisis temuan, dan pembahasan hasil.

Terakhir, bab lima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan penelitian beserta saran-saran dari peneliti. Dengan demikian, sistematika ini membantu pembaca memahami alur dan isi pembahasan skripsi secara menyeluruh dari pendahuluan hingga penutup.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

Desa Ngadisari merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jukawa Timur, Indonesia. Desa ini memiliki sejarah yang terkait dengan keberadaan Gunung Bromo, salah satu gunung berapi paling terkenal di Indonesia.

Desa Ngadisari memiliki posisi yang strategis sebagai gerbang menuju Gunung Bromo. Gunung Bromo adalah salah satu destinasi wisata alam yang populer di Indonesia, terkenal dengan keindahan kawahnya yang spektakuler dan pemandangan matahari terbit yang epik. Desa ini menjadi tempat singgah dan akomodasi bagi para wisatawan yang ingin menjelajahi Gunung Bromo.

Desa Ngadisari, yang terletak di kaki Gunung Bromo di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, memiliki sejumlah keunikan yang membuatnya menarik bagi wisatawan dan para peneliti budaya. Desa Ngadisari memiliki lokasi yang sangat strategis sebagai pintu gerbang utama menuju kawasan Gunung Bromo. Ini menjadikannya tempat yang nyaman bagi wisatawan yang ingin menjelajahi keindahan Gunung Bromo dan kawasan sekitarnya. Desa Ngadisari adalah bagian dari daerah suku Tengger, sebuah kelompok etnis dengan budaya dan tradisi yang khas. Salah satu aspek budaya yang menonjol adalah upacara tahunan Kasada atau Kesodo, di mana penduduk setempat naik

ke kawah Gunung Bromo untuk memberikan persembahan kepada dewa-dewa dalam bentuk buah-buahan, sayuran, dan hewan. Upacara ini mencerminkan keunikan dan warisan budaya masyarakat Tengger.

Desa ini juga dikenal karena kerajinan tangan lokalnya, termasuk tenun tradisional dan souvenir khas Tengger. Wisatawan memiliki kesempatan untuk membeli oleh-oleh yang unik dan berkualitas dari desa ini. Meskipun mayoritas penduduk Desa Ngadisari menganut agama Hindu Tengger, di sini juga ada tempat ibadah untuk berbagai agama lainnya, seperti masjid dan gereja. Hal ini mencerminkan toleransi dan keharmonisan antarumat beragama di desa ini.

Meskipun berkembang sebagai tujuan wisata, Desa Ngadisari tetap berhasil mempertahankan nuansa tradisionalnya. Anda akan menemukan perpaduan antara fasilitas modern dan budaya khas Tengger yang masih terasa kuat di desa ini. Desa Ngadisari dikenal sebagai desa yang bersih dan rapi. Penduduknya sangat peduli akan kebersihan lingkungan mereka, sehingga menjaga desa tetap indah dan nyaman bagi wisatawan. Semua ini menjadikan Desa Ngadisari sebagai tujuan wisata yang menarik dan memiliki keunikan tersendiri dalam hal budaya, alam, dan interaksi antara masyarakat dan lingkungan alam di sekitarnya.

Gunung Bromo merupakan sebuah gunung berapi yang aktif di Jawa Timur, dengan ketinggian mencapai 2.329 meter di atas permukaan laut, Gunung Bromo terletak di empat wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten

Malang. Keberadaan Gunung Bromo yang masih aktif menjadikannya sebagai objek wisata utama di Jawa Timur.

Key players dalam perencanaan dan pengelolaan pariwisata adalah pihak-pihak yang memiliki peran penting dan terlibat secara langsung dalam berbagai aspek pengembangan destinasi pariwisata. Terdapat empat pihak yang dapat diidentifikasi sebagai *key players* dalam konteks ini, yakni wisatawan, masyarakat "tuan rumah" (*host community*), industri pariwisata (*tourism industry*), dan pemerintah. Wisatawan sebagai konsumen pariwisata memiliki peran krusial dalam menentukan permintaan, preferensi, dan dampak ekonomi yang dihasilkan oleh destinasi tersebut. Masyarakat "tuan rumah" berperan sebagai tuan rumah yang menyediakan pelayanan dan pengalaman lokal, serta mempengaruhi keberlanjutan budaya dan lingkungan. Industri pariwisata, meliputi penyedia layanan perjalanan, akomodasi, dan aktivitas wisata, turut serta dalam membentuk struktur dan daya tarik destinasi. Pemerintah memiliki peran regulatori dan strategis dalam membentuk kebijakan, mengelola infrastruktur, dan memastikan keberlanjutan serta pengembangan pariwisata yang berdaya saing.

Wisata Gunung Bromo secara tertulis tergolong sebagai bagian integral dari Taman Nasional Bromo Tengger, yang dikelola secara langsung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Gunung Bromo berada di bawah yurisdiksi empat pemerintah daerah, yakni Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, dan Malang. Oleh karena itu, pemerintah daerah di wilayah tersebut menjadi salah satu *key players* yang memiliki peran signifikan dalam

perencanaan dan pengelolaan wisata Gunung Bromo. Sejalan dengan definisi tersebut, wisatawan yang berkunjung ke Gunung Bromo bukan hanya sebagai konsumen, tetapi juga sebagai pihak yang turut serta dalam perencanaan dan pengelolaan destinasi ini. Para wisatawan memiliki tanggung jawab dan kewajiban tertentu ketika mengunjungi Gunung Bromo, sehingga partisipasi aktif mereka menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan dan keberhasilan pengelolaan wisata di kawasan tersebut.

Masyarakat memainkan peran sentral sebagai pemangku kepentingan utama dalam perencanaan dan pengelolaan destinasi pariwisata Gunung Bromo dengan penekanan pada pencapaian keberlanjutan. Peran masyarakat tidak hanya terbatas sebagai tuan rumah, melainkan juga mencakup fungsi sebagai bagian integral dari sektor industri pariwisata. Khususnya, masyarakat yang menetap di sekitar Gunung Bromo, terutama Desa Ngadisari, menunjukkan peran yang signifikan dengan menyediakan layanan perjalanan, fasilitas akomodasi, dan melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung sektor pariwisata. Keterlibatan aktif masyarakat dalam memberikan layanan dan mendukung kegiatan industri pariwisata memberikan landasan esensial dalam upaya mencapai keberlanjutan, sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Melibatkan masyarakat secara efektif dan berkelanjutan dalam proses pengelolaan dan perencanaan wisata Gunung Bromo bukan hanya meningkatkan kesejahteraan lokal, tetapi juga mendukung pelestarian lingkungan dan warisan budaya di kawasan tersebut.

B. Kondisi Ekonomi

Selain faktor geografis dan atraksi wisata, kondisi sosial-ekonomi masyarakat juga dipengaruhi oleh identitas budaya, yang tercermin dalam gaya hidup, adat istiadat, dan tradisi. Keunikan budaya menjadi daya tarik bagi pariwisata dan penelitian masyarakat, menawarkan potensi untuk pemahaman mendalam terhadap dinamika sosial-ekonomi serta pengembangan destinasi wisata yang autentik.

Suku Tengger mengenali potensi wilayahnya tidak hanya sebagai tujuan wisata alam, melainkan juga sebagai destinasi unik dalam konteks kekayaan budayanya. Keunikan ini termanifestasi dalam tradisi dan adat istiadat yang dilaksanakan oleh masyarakat Tengger di sekitar Gunung Bromo. Beberapa upacara adat yang menjadi daya tarik khusus dari suku Tengger mencakup perayaan seperti upacara kasada, upacara karo, entas-entas, unan-unan, pujan Mubeng, upacara kematian, sesayut, praswala gara, dan upacara perkawinan. Adat istiadat ini tidak hanya menyumbang pada kekayaan budaya lokal, tetapi juga memberikan daya tarik signifikan bagi wisatawan yang tertarik untuk merasakan dan memahami tradisi dan nilai-nilai masyarakat Tengger secara mendalam.

Desa Ngadisari, yang terletak di kecamatan Sukapura, menjadi salah satu pemukiman utama bagi suku Tengger. Dengan posisi strategisnya, desa ini berfungsi sebagai jalur utama dan berdekatan secara signifikan dengan pintu masuk menuju Wisata Gunung Bromo. Keberadaan destinasi wisata gunung di wilayah ini berkontribusi positif terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat suku Tengger. Analisis mendalam terkait dampak sosial-ekonomi yang dihasilkan oleh keberadaan wisata gunung menjadi suatu aspek menarik untuk dijelajahi. Sejauh mana dampak

tersebut memberikan kontribusi positif terhadap sosial-ekonomi masyarakat suku Tengger merupakan pokok perhatian yang penting dalam konteks pembangunan dan keberlanjutan di wilayah tersebut.

1. Pekerjaan Utama

Faktor alam, terutama jenis tanah yang subur, memainkan peran penting dalam mendukung kegiatan pertanian di Desa Ngadisari. Kondisi alam yang menguntungkan ini membuat mayoritas penduduk desa ini bermata pencaharian sebagai petani.

Tanah di Desa Ngadisari memiliki kesuburan yang baik untuk pertanian. Jenis tanah ini cocok untuk bercocok tanam sayuran seperti kubis, sawi, bawang daun, dan kentang. Tanah yang subur memungkinkan tanaman tumbuh dengan baik dan menghasilkan hasil panen yang melimpah. Sebagian besar penduduk Desa Ngadisari, yaitu sekitar 916 penduduk, bekerja sebagai petani. Kegiatan pertanian telah menjadi mata pencaharian utama bagi mayoritas penduduk desa ini. Hal ini menunjukkan pentingnya pertanian dalam perekonomian dan kehidupan sehari-hari masyarakat.

Kegiatan bertani telah menjadi bagian dari rutinitas dan tanggungjawab anggota keluarga di Desa Ngadisari. Mulai dari suami, istri, hingga anak-anak, semua berpartisipasi dalam menggarap tanah pertanian milik keluarga. Hal ini mencerminkan pentingnya pertanian dalam menjaga kelangsungan hidup dan mencukupi kebutuhan makanan keluarga. Sayuran seperti kubis, bawang daun, dan kentang merupakan jenis tanaman yang cocok ditanam di daerah ini.

Tanaman-tanaman ini menghasilkan hasil panen yang signifikan, seperti kubis dengan produksi sekitar 270 hektar: 4050 ton, bawang daun dengan produksi sekitar 361 hektar: 3610 ton, dan kentang dengan produksi sekitar 300 hektar: 3000 ton.

Bertani tidak hanya menjadi mata pencaharian di Desa Ngadisari, tetapi merupakan tradisi yang dilakukan secara berkelanjutan hingga hari ini. Faktor sebagian besar keluarga memiliki masing-masing tanah garapan membuat setiap anak mengikuti tradisi orang tua mereka. Banyak anak yang memiliki pendidikan tinggi tetapi tidak menyebabkan mereka melepaskan tradisi tersebut begitu saja. Menurut penuturan kepala Desa Ngadisari, meskipun banyak anak yang memiliki pendidikan tinggi, setiap kali mereka pulang ke rumah mereka tetap membantu pekerjaan orang tuanya di ladang.

Dalam konteks ini, pertanian memiliki peran sentral dalam kehidupan masyarakat Desa Ngadisari. Tanah yang subur dan hasil panen yang melimpah telah membentuk pola mata pencaharian, rutinitas harian, dan pandangan terhadap pendidikan di komunitas tersebut.

2. Analisis Wisata Bromo pada Ekonomi Masyarakat

Di samping bermata pencaharian sebagai petani, penduduk Desa Ngadisari juga memiliki berbagai jenis mata pencaharian lainnya. Meskipun sebagian kecil, ada juga penduduk yang bekerja sebagai buruh tani. Mereka mungkin membantu petani lain dalam kegiatan pertanian seperti penanaman, pemupukan, atau panen.

Beberapa penduduk terlibat dalam perdagangan dengan menjadi pedagang, pemilik toko, atau pemilik kios. Mereka menjual berbagai jenis barang kebutuhan sehari-hari kepada masyarakat setempat. Individu juga dapat memiliki usaha mikro seperti pom mini, warung, atau kios. Usaha-usaha ini dapat menyediakan berbagai macam produk dan layanan kepada warga desa dan wisatawan.

Beberapa penduduk mungkin memiliki usaha akomodasi seperti hotel, villa, homestay, atau guest house. Mereka menyediakan tempat menginap bagi wisatawan yang datang ke daerah tersebut. Di tengah perkembangan teknologi, pemilik warnet (warung internet) juga dapat menjadi pilihan mata pencaharian. Mereka menyediakan akses internet bagi masyarakat yang membutuhkannya. Profesi seperti tukang jahit, tukang cukur, tukang kayu, dan tukang bangunan merupakan bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Mereka menyediakan jasa berbagai jenis pekerjaan sesuai keahlian masing-masing.

Pengrajin batik adalah contoh dari mata pencaharian dalam bidang kerajinan tangan. Mereka menciptakan karya seni batik yang unik dan bernilai. Sebagian penduduk mungkin bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia), atau POLRI (Kepolisian Republik Indonesia), atau pejabat daerah. Mereka memiliki peran dalam pemerintahan dan penegakan hukum. Dalam konteks pariwisata, sopir hardtop atau anggota paguyuban jeep memiliki peran penting sebagai pemandu wisatawan yang ingin menjelajahi daerah dengan menggunakan kendaraan off-road. Karena Desa Ngadisari mungkin memiliki potensi wisata alam atau petualangan, pemandu kuda dapat

menjadi mata pencaharian yang relevan bagi wisatawan yang tertarik dengan aktivitas bersepeda gunung atau jelajah alam. Mata pencaharian yang beragam ini mencerminkan adanya dinamika ekonomi dan kehidupan masyarakat yang kaya dalam hal keragaman profesi dan usaha. Setiap mata pencaharian memiliki peran dan kontribusi tersendiri dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Desa Ngadisari.

Tabel 4. 1 Mata pencaharian masyarakat Desa Ngadisari

No	Mata Pencaharian	Jumlah (orang)
1	Tani	572
2	Buruh Tani	37
3	Pedagang	2
4	Pemilik Toko	25
5	Pemilik Kios	7
6	Pemilik Pom Mini	1
7	Pemilik Warung	16
8	Pemilik Jasa Hotel	6
9	Pemilik Villa/Homestay	201
10	Pemilik Guest House	1
11	Pemilik Warnet	1
12	Jasa Air	1
13	Tukang Jahit	2

14	Tukang Cukur	3
15	Tukang Kayu	14
16	Tukang Bangunan	10
17	Pengrajin Batik	7
18	PNS, Pejabat Daerah	14
19	TNI, POLWAN	2
20	Supir Hardtop	400
21	Pemandu Kuda	200

Mata pencaharian penduduk di Desa Ngadisari tidak hanya terbatas pada bertani. Selain sebagai petani, sebagian besar penduduk di wilayah ini juga terlibat dalam bisnis penginapan. Jenis-jenis penginapan yang umum di wilayah ini adalah *guest house*, *homestay*, dan *villa*. Hal ini terkait dengan pertumbuhan industri pariwisata dan berkembangnya produk wisata di daerah tersebut.

Penginapan berjenis *guest house*, *homestay*, dan *villa* menjadi pilihan utama baik bagi masyarakat lokal maupun wisatawan asing yang mengunjungi kawasan Gunung Bromo. Hal ini disebabkan oleh harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan penginapan hotel. Karena itu, bisnis penginapan semacam ini semakin berkembang pesat dari tahun ke tahun, terutama karena tingginya permintaan dan keuntungan yang dapat diperoleh.

Selain sebagai pemilik penginapan, penduduk Desa Ngadisari juga terlibat dalam pengembangan komunitas jeep dan kuda. Organisasi seperti Paguyuban Jeep dan Paguyuban Kuda telah didirikan oleh Pemerintah Desa Ngadisari. Komunitas ini memberikan layanan sewa jeep dan kuda kepada wisatawan yang ingin menjelajahi kawasan Gunung Bromo. Beberapa lokasi wisata hanya dapat dijangkau dengan menggunakan jeep atau dengan bantuan pemandu kuda, sehingga layanan ini sangat penting bagi para pengunjung.

Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada pengunjung, terutama bagi pemilik bisnis penginapan dan penyedia layanan transportasi wisata jeep, pemesanan dan reservasi dilakukan secara online. Banyak dari mereka memanfaatkan platform media sosial seperti Instagram, media online seperti website, serta platform bisnis travel seperti Pegipegi dan Traveloka untuk memudahkan proses pemesanan dan penawaran layanan.

Dengan demikian, mata pencaharian utama penduduk Desa Ngadisari mencakup pertanian, bisnis penginapan (*guest house, homestay, villa*), serta layanan penyewaan jeep dan kuda untuk keperluan wisatawan yang berkunjung ke kawasan Gunung Bromo.

C. Analisis Program Desa EMAS terhadap Ekonomi Masyarakat

1. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Program BUMDes adalah singkatan dari Badan Usaha Milik Desa. Ini adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya untuk

mengembangkan ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembentukan dan pengelolaan berbagai jenis usaha di tingkat desa.

BUMDes berfungsi sebagai entitas usaha yang dimiliki oleh masyarakat desa dan dikelola secara kolektif untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, serta menggerakkan roda perekonomian di desa. BUMDes dimiliki oleh masyarakat desa secara kolektif. Ini memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mengelola dan mengambil keputusan terkait dengan usaha-usaha yang ada. BUMDes dapat beroperasi di berbagai sektor ekonomi, seperti pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, kerajinan, pengolahan makanan, energi terbarukan, dan lain sebagainya. Pemilihan jenis usaha harus didasarkan pada potensi dan kebutuhan masyarakat setempat.

BUMDes dikelola secara profesional dengan tujuan mencapai efisiensi, produktivitas, dan profitabilitas. Keuntungan yang diperoleh dari usaha BUMDes dapat digunakan untuk pengembangan desa, seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Program BUMDes bertujuan untuk memberdayakan masyarakat desa dengan memberikan peluang bagi warga desa untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan, pelatihan, dan pembelajaran dalam mengelola bisnis.

BUMDes dapat menjalin kemitraan dan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, perguruan tinggi, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah untuk mendukung pengembangan usaha dan peningkatan kapasitas. Program BUMDes juga dapat mendukung pengembangan produk lokal, pelestarian budaya, serta pemanfaatan sumber daya alam yang

berkelanjutan. BUMDes dapat mengakses pendanaan dari berbagai sumber, termasuk dana desa, program pemerintah, hibah, pinjaman, dan investasi.

Program BUMDes bertujuan untuk menciptakan dampak positif dalam pembangunan desa dan mendorong kesejahteraan masyarakat melalui pembentukan usaha berbasis lokal. Ini adalah bagian dari upaya pemerintah dalam mengurangi disparitas ekonomi antara daerah perkotaan dan pedesaan.

Program BUMDes Ngadisari menghadirkan inisiatif pembentukan Desa Wisata Edelweiss sebagai bagian dari upaya diversifikasi ekonomi dan konservasi lingkungan. Sebanyak 5.600 bibit edelweiss diperoleh oleh masyarakat melalui BB-TNBTS, memungkinkan pengembangan tanaman ini di lahan seluas satu hektar. Proyek pembangunan Desa Wisata Edelweiss dimulai pada tahun 2014 dan mencapai penyelesaian pada tahun 2018, menandai kesiapan untuk diresmikan melalui Festival Land of Edelweiss.

Tanaman edelweiss yang ditanam di desa tersebut telah mencapai kategori generasi kedua (F2) dan telah memperoleh izin penangkaran dari Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Timur. Selanjutnya, pengelolaan tanaman edelweiss ini akan diserahkan kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Inisiatif ini tidak hanya memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat setempat melalui sektor pariwisata, tetapi juga mendemonstrasikan komitmen terhadap pelestarian alam dan upaya konservasi di tingkat lokal.



Gambar 4.1 Desa Wisata Edelweiss Ngadisari

Selain menginisiasi Desa Wisata Edelweiss, BUMDes Desa Ngadisari juga mencanangkan pengembangan sektor wisata budaya. Langkah ini diwujudkan melalui pembangunan sebuah rumah adat suku Tengger di Dusun Cemorolawang, Desa Ngadisari, yang dirancang mirip sebuah mini museum. Rumah adat ini diharapkan menjadi bangunan induk, difungsikan sebagai tempat penyimpanan barang-barang yang digunakan dalam upacara Kasada atau keperluan adat lainnya. Selain itu, ruang tersebut akan dimanfaatkan untuk menampilkan beragam benda dan perabot rumah tangga tradisional, menawarkan pengunjung wawasan mendalam mengenai warisan budaya suku Tengger. Melalui inisiatif ini, BUMDes memainkan peran strategis dalam mempromosikan dan melestarikan aspek budaya masyarakat setempat, sekaligus memperkaya pengalaman wisatawan yang berkunjung ke Desa Ngadisari.



Gambar 4.2 Rumah Suku Adat Tengger

Sumber: www.radarbromo.com

Meskipun mayoritas penduduk Ngadisari mengandalkan pekerjaan mereka pada sektor pariwisata Gunung Bromo, BUMDes Ngadisari memainkan peran signifikan dalam mendukung perekonomian masyarakat. Hal ini tergambar pada respons BUMDes Ngadisari terhadap penurunan jumlah pengunjung selama masa pandemi COVID-19. Dalam situasi tersebut, BUMDes Ngadisari mengambil inisiatif dengan membentuk kebun stroberi, yang dapat diolah oleh masyarakat setempat sebagai alternatif untuk menjaga dan melanjutkan keberlanjutan perekonomian lokal. Tindakan ini menunjukkan peran penting BUMDes dalam menghadapi tantangan ekonomi, serta memberikan contoh adaptabilitas dan diversifikasi ekonomi dalam mendukung kesejahteraan masyarakat di tengah ketidakpastian yang diakibatkan oleh situasi pandemi.



Gambar 4.3 Perkebunan Stroberi Desa Ngadisari

Dalam konteks ketergantungan sebagian besar masyarakat pada pertanian dan sektor pariwisata Gunung Bromo di desa Ngadisari, peran BUMDes tetap signifikan dalam memberikan dukungan bagi kelancaran aktivitas sehari-hari. Meskipun mata pencaharian sebagian besar penduduk bersandar pada pemanfaatan tanah subur untuk bertani dan sektor pariwisata Bromo, BUMDes terus menjalankan fungsinya sebagai penyedia fasilitas penunjang. Fasilitas ini mencakup berbagai layanan yang mempermudah kehidupan masyarakat, menjadikannya sebagai entitas penting dalam mendukung kelangsungan hidup dan perekonomian di desa tersebut.

2. Program Desa EMAS

Program "Desa EMAS" (*Entrepreneur, Mandiri, Adil, dan Sejahtera*) merupakan salah satu program pembangunan desa yang berfokus pada empat pilar utama: Kewirausahaan, Kemandirian, Keadilan, dan Kesejahteraan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan potensi dan kesejahteraan masyarakat

desa melalui pengembangan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan penciptaan lingkungan yang adil.

Berikut adalah penjelasan singkat tentang setiap pilar dalam program Desa EMAS:

1. Kewirausahaan (*Entrepreneurship*): Pilar ini mendorong masyarakat desa untuk mengembangkan keterampilan berwirausaha dan memulai usaha mikro, kecil, atau menengah (UMKM). Pelatihan, pendampingan, dan dukungan lainnya diberikan untuk membantu penduduk desa menjadi pengusaha yang sukses.
2. Kemandirian (Mandiri): Pilar ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat desa dalam mengelola sumber daya alam dan ekonomi lokal. Masyarakat didorong untuk mengembangkan inisiatif dan proyek mandiri yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan.
3. Keadilan (Adil): Pilar ini berfokus pada aspek keadilan sosial dan pemerataan akses terhadap sumber daya dan peluang. Program Desa EMAS mengupayakan agar setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan mendapatkan manfaat dari pembangunan.
4. Kesejahteraan (Sejahtera): Pilar ini mencakup upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengembangan ekonomi, akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Implementasi program Desa EMAS di Desa Ngadisari mencakup langkah-langkah seperti pelatihan kewirausahaan, pengembangan UMKM lokal, pemberian

modal usaha, pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan keterampilan masyarakat, dan lain sebagainya.

Keberadaan objek wisata Gunung Bromo memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ekonomi Desa Ngadisari dan wilayah sekitarnya. Wisata Gunung Bromo adalah salah satu tujuan wisata populer di Indonesia, dan dampaknya terhadap ekonomi desa dapat dilihat dari beberapa aspek:

1. Wisatawan yang datang untuk mengunjungi Gunung Bromo memberikan sumber pendapatan penting bagi masyarakat Desa Ngadisari. Pendapatan ini dapat berasal dari berbagai sektor, termasuk akomodasi (penginapan), transportasi (sewa jeep dan kuda), makanan dan minuman, serta kerajinan tangan dan souvenir.
2. Industri pariwisata Gunung Bromo menciptakan peluang kerja bagi penduduk desa dalam berbagai sektor, seperti pemandu wisata, sopir jeep, petugas penginapan, pedagang makanan, dan lain-lain. Hal ini membantu mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.
3. Dalam rangka melayani kebutuhan wisatawan, perluasan dan perbaikan infrastruktur biasanya dilakukan, seperti perbaikan jalan, penambahan fasilitas umum, dan lain-lain. Ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat desa dan meningkatkan aksesibilitas.
4. Adanya wisatawan memicu permintaan terhadap produk-produk lokal seperti kerajinan tangan, tekstil tradisional, dan makanan khas daerah. Masyarakat desa dapat mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memenuhi kebutuhan wisatawan.

5. Keberhasilan wisata Gunung Bromo menarik minat investor untuk membuka usaha di daerah tersebut, termasuk pengembangan properti, restoran, dan layanan lainnya. Hal ini dapat menciptakan peluang bisnis dan menggerakkan ekonomi lokal.
6. Pendapatan yang diperoleh dari industri pariwisata dapat membantu meningkatkan kualitas hidup penduduk desa, memungkinkan akses lebih baik terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Namun, perlu diingat bahwa pengembangan pariwisata juga dapat membawa tantangan, seperti dampak lingkungan dan pemeliharaan budaya. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan dan seimbang agar manfaat ekonomi dapat dinikmati tanpa mengorbankan lingkungan dan kelestarian budaya.

Program Desa EMAS (*Entrepreneur, Mandiri, Adil, dan Sejahtera*) dapat memiliki dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi Desa Ngadisari dengan memanfaatkan keberadaan tempat wisata Gunung Bromo. Berikut adalah beberapa cara di mana program Desa EMAS dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi desa melalui pengembangan wisata Gunung Bromo:

1. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM): Program Desa EMAS dapat memberikan pelatihan dan pendampingan kepada warga desa untuk mengembangkan UMKM yang terkait dengan industri pariwisata Gunung Bromo. Contoh-contoh usaha yang dapat dikembangkan termasuk penyewaan jeep, *homestay*, produksi kerajinan

tangan, penjualan makanan dan minuman khas, serta layanan pemandu wisata.

2. **Pemberdayaan Masyarakat Lokal:** Program Desa EMAS dapat memberikan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan kepada masyarakat desa, membantu mereka memahami peluang bisnis yang terkait dengan wisata Gunung Bromo. Ini akan membantu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam mengelola usaha yang berhubungan dengan wisata.
3. **Pengelolaan Wisata yang Berkelanjutan:** Program Desa EMAS dapat membantu masyarakat desa dalam mengelola objek wisata secara berkelanjutan. Ini meliputi pemeliharaan lingkungan, pengelolaan sampah, dan konservasi alam agar wisatawan terus tertarik untuk datang dan mendukung upaya pelestarian.
4. **Kemitraan dan Jaringan Bisnis:** Program Desa EMAS dapat membantu penduduk desa menjalin kemitraan dengan pelaku bisnis di luar desa, seperti penyedia layanan transportasi, distributor bahan baku, atau mitra promosi. Ini dapat meningkatkan aksesibilitas dan distribusi produk desa, serta memperluas jangkauan pasar.
5. **Promosi dan Pemasaran:** Program Desa EMAS dapat memberikan pelatihan tentang pemasaran dan promosi kepada masyarakat desa. Ini termasuk penggunaan media sosial, website, dan platform online lainnya untuk mempromosikan usaha dan daya tarik wisata Gunung Bromo.

6. Peningkatan Kualitas Layanan: Program Desa EMAS dapat mendorong pelayanan yang lebih baik bagi wisatawan. Ini meliputi pelatihan dalam pelayanan pelanggan, perbaikan fasilitas wisata, serta peningkatan kualitas akomodasi dan makanan.
7. Diversifikasi Ekonomi: Selain sektor wisata, Program Desa EMAS juga dapat membantu masyarakat desa dalam mengembangkan sektor ekonomi lainnya. Ini penting untuk mengurangi ketergantungan pada satu sektor dan menciptakan ekonomi yang lebih beragam dan tangguh.

Dengan mengintegrasikan program Desa EMAS dengan pengembangan wisata Gunung Bromo, Desa Ngadisari dapat mengoptimalkan potensi ekonomi lokal, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menciptakan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi desa secara keseluruhan.

Desa Ngadisari, yang terletak paling dekat dengan Gunung Bromo, telah menjadi destinasi pariwisata yang menarik bagi wisatawan lokal dan mancanegara. Mayoritas penduduk desa terlibat dalam profesi yang berhubungan dengan pariwisata, seperti penyewaan jeep, penyedia layanan villa, dan penyewaan kuda untuk menjelajahi keindahan Gunung Bromo. Pariwisata telah menjadi tulang punggung ekonomi desa, namun pemerintah menyadari perlunya meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor ini untuk mencapai perekonomian yang lebih berkelanjutan dan sejahtera.

Sebagai respons terhadap keadaan ini, Pemerintah Desa Ngadisari mengenalkan Program Desa EMAS (*Entrepreneur, Mandiri, Aman, Sejahtera*), yang dirancang untuk secara tidak langsung meningkatkan perekonomian desa

dengan meningkatkan kualitas SDM dalam sektor pariwisata. Dalam program ini, tiga profesi utama yang terlibat dalam pariwisata, yaitu penyewa jeep, penyedia layanan villa, dan penyewaan kuda, diberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan khusus untuk meningkatkan daya saing mereka dalam menawarkan jasa.

Salah satu fokus utama dari pelatihan ini adalah pemanfaatan media sosial sebagai alat pemasaran yang efektif. Para peserta pelatihan diajarkan cara menggunakan platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan TripAdvisor untuk mempromosikan layanan mereka kepada audiens yang lebih luas. Mereka belajar tentang pembuatan konten yang menarik dan kreatif, strategi penjangkauan target, dan cara berinteraksi dengan pelanggan potensial.

Selain itu, pelatihan juga mencakup pembuatan pamflet yang menarik dan informatif. Pamflet ini digunakan untuk memperkenalkan berbagai paket wisata, layanan penginapan, dan pengalaman yang dapat ditawarkan kepada para wisatawan. Desain pamflet dibahas secara mendalam, dengan penekanan pada estetika dan kejelasan informasi yang disampaikan kepada pelanggan potensial.

Hasil dari program ini telah sangat positif. Penduduk desa yang telah mengikuti pelatihan mampu mengembangkan kehadiran online mereka dengan lebih baik melalui media sosial, meningkatkan jumlah pemesanan dan permintaan layanan mereka. Pamflet yang mereka hasilkan juga telah membantu dalam mengedukasi wisatawan tentang berbagai pilihan yang tersedia di Desa Ngadisari.

Penelitian yang dilakukan dalam konteks program ini telah mengungkapkan dampak positif pada perekonomian desa. Peningkatan jumlah

wisatawan yang datang ke desa telah meningkatkan pendapatan penduduk secara signifikan. Ini berarti bahwa program Desa EMAS bukan hanya meningkatkan kualitas hidup penduduk, tetapi juga memperkuat ekonomi lokal secara keseluruhan.

Program Desa EMAS memberikan dampak positif yang terlihat jelas pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama melalui pengembangan fasilitas publik. Salah satu aspek yang mencolok adalah pembangunan Tempat Pembuangan Sampah (TPS), yang memberikan kontribusi signifikan terhadap upaya pengelolaan limbah dan menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu, pengembangan fasilitas toilet umum juga merupakan bagian integral dari program ini, memberikan akses yang lebih baik dan kondisi sanitasi yang memadai bagi masyarakat. Melalui inisiatif ini, Program Desa EMAS tidak hanya meningkatkan infrastruktur, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap kesehatan masyarakat dan peningkatan standar sanitasi di tingkat lokal.



Gambar 4.4 Pembuatan Toilet Umum



Gambar 4.5 Pembuatan Tempat Pembuangan Sampah (TPS)

Secara khusus, dapat dicatat bahwa keberadaan Program Desa EMAS membawa dampak positif yang signifikan terhadap aspek perekonomian masyarakat yang mata pencahariannya terkait dengan sektor pariwisata Gunung Bromo, melalui upaya pemberdayaan masyarakat, berikut:

1. Analisis pada Penyewa Jeep

Setelah mengikuti pelatihan media sosial, penyewa jeep dapat membuat akun media sosial yang menarik dan informatif. Mereka dapat membagikan foto-foto perjalanan dan pengalaman wisata yang menarik, menciptakan ekspektasi positif di antara calon pelanggan.

Dengan pamflet yang baik dirancang, penyewa jeep dapat menggambarkan berbagai pilihan paket wisata, termasuk rute yang berbeda dan layanan tambahan yang mereka tawarkan. Ini membantu memandu wisatawan dalam memilih paket yang sesuai dengan keinginan mereka.

Dampak positif dari pelatihan ini adalah peningkatan permintaan untuk layanan penyewaan jeep. Calon pelanggan lebih mungkin menghubungi mereka setelah melihat postingan media sosial yang menarik atau membaca pamflet informatif.

2. Analisis pada Penyedia Layanan Villa

Penyedia layanan villa dapat menggunakan media sosial untuk membagikan gambar-gambar villa mereka, memberikan informasi tentang fasilitas, dan mendemonstrasikan pengalaman menginap yang menyenangkan. Hal ini membantu menarik perhatian wisatawan yang mencari akomodasi yang nyaman. Pamflet yang mereka hasilkan dapat mempromosikan berbagai jenis kamar, harga, dan paket penginapan. Hal ini memungkinkan calon tamu untuk membuat pilihan yang sesuai dengan anggaran dan preferensi mereka. Dengan pemasaran yang lebih efektif melalui media sosial dan pamflet, penyedia layanan villa dapat mengalami peningkatan tingkat okupansi, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan mereka.

3. Analisis pada Penyewaan Kuda

Penyewa kuda dapat menarik perhatian wisatawan yang tertarik untuk menjelajahi Bromo dengan cara yang unik melalui media sosial. Mereka dapat membagikan foto-foto eksklusif dari perjalanan bersama kuda dan menunjukkan bahwa pengalaman ini bisa menjadi salah satu yang tak

terlupakan. Pamflet yang mencakup berbagai jenis perjalanan kuda dan harganya memungkinkan calon pelanggan untuk memilih pengalaman yang sesuai dengan kemampuan dan minat mereka. Dengan promosi yang lebih baik, penyewa kuda dapat mengalami peningkatan permintaan untuk layanan mereka, terutama dari wisatawan yang mencari petualangan alam yang mendalam.

Secara keseluruhan, pengaruh dari pelatihan media sosial dan pembuatan pamflet dalam program Desa EMAS adalah meningkatkan kemampuan ketiga profesi tersebut untuk memasarkan layanan mereka dengan lebih efektif dan menarik wisatawan yang lebih banyak. Ini berdampak langsung pada pendapatan mereka dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi desa secara keseluruhan.

Desa Ngadisari, yang terletak dengan sangat dekat dengan Gunung Bromo, telah menjadi magnet utama bagi para wisatawan yang ingin mengeksplorasi keindahan alam dan budaya di sekitar Gunung Bromo. Mayoritas penduduk desa memiliki profesi yang sangat terkait dengan industri pariwisata, termasuk penyewa jeep, penyedia layanan villa, dan penyewaan kuda untuk menjelajahi pemandangan spektakuler Gunung Bromo. Pariwisata telah menjadi tulang punggung ekonomi desa ini, tetapi pemerintah setempat menyadari bahwa untuk menjaga keberlanjutan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan penduduk desa, langkah-langkah perbaikan harus diambil.

Sebagai respon terhadap keadaan ini, Pemerintah Desa Ngadisari memperkenalkan Program Desa EMAS, singkatan dari *Entrepreneur*, Mandiri, Aman, Sejahtera. Program ini bertujuan untuk meningkatkan ekonomi desa melalui

peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat dalam sektor pariwisata. Salah satu pendekatan utama dalam mencapai tujuan ini adalah melalui pelatihan intensif dan pengembangan keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan ketiga profesi utama yang mendominasi pariwisata di Desa Ngadisari.

Setelah menjalani pelatihan yang intens, penyewa jeep di Desa Ngadisari telah mampu mengubah pendekatan mereka dalam memasarkan layanan mereka. Mereka kini memanfaatkan media sosial dengan efektif untuk membagikan pengalaman wisata menarik dan menggoda calon pelanggan. Postingan tentang petualangan dengan jeep di sekitar Bromo, disertai dengan gambar dan cerita perjalanan yang menarik, telah menjadi daya tarik yang kuat. Pamflet yang dirancang dengan baik juga memberikan informasi yang jelas dan memikat tentang paket wisata mereka. Dalam hal ini, pengaruh program Desa EMAS adalah meningkatnya permintaan dan pangsa pasar bagi penyewa jeep. Mereka mengalami peningkatan jumlah pelanggan yang tertarik dan percaya pada layanan mereka.

Bagi penyedia layanan villa di Desa Ngadisari, pelatihan dalam menggunakan media sosial sebagai alat pemasaran telah membuka peluang yang tak terbatas. Mereka dapat sekarang menampilkan villa-villa mereka secara detail, menunjukkan fasilitas mewah, dan menghadirkan pengalaman menginap yang nyaman melalui media sosial. Pamflet yang dibuat dengan hati-hati juga telah membantu dalam menggambarkan berbagai tipe kamar dan harga, memungkinkan calon tamu untuk memilih sesuai dengan keinginan dan anggaran mereka. Dalam kasus ini, pengaruh program Desa EMAS adalah peningkatan tingkat okupansi villa,

yang menghasilkan pendapatan yang signifikan bagi penyedia villa dan kontribusi yang lebih besar pada perekonomian desa secara keseluruhan.

Penyewa kuda di Desa Ngadisari telah menemukan manfaat besar dalam penggunaan media sosial untuk menarik wisatawan yang tertarik untuk menjelajahi Bromo dengan cara yang lebih alami dan mendalam. Mereka dapat sekarang berbagi foto-foto epik dari perjalanan bersama kuda dan menunjukkan bagaimana pengalaman ini dapat menjadi salah satu yang tak terlupakan. Pamflet yang mencakup berbagai jenis perjalanan kuda dan harganya memungkinkan calon pelanggan untuk membuat pilihan yang sesuai dengan minat dan keterampilan mereka. Dalam kasus ini, pengaruh program Desa EMAS adalah peningkatan permintaan untuk layanan penyewaan kuda. Semakin banyak wisatawan tertarik untuk menjelajahi Bromo dengan bantuan kuda, yang menguntungkan penyewa kuda dan secara positif berdampak pada perekonomian desa.

Secara keseluruhan, program Desa EMAS telah membawa perubahan signifikan dalam cara ketiga profesi utama terkait pariwisata beroperasi. Dengan memanfaatkan media sosial untuk pemasaran dan pembuatan pamflet yang menarik, mereka telah mampu menciptakan daya tarik yang lebih besar bagi wisatawan, meningkatkan jumlah pelanggan, dan menghasilkan pendapatan yang lebih besar. Program ini bukan hanya memberikan manfaat kepada individu-individu yang terlibat dalam profesi ini, tetapi juga meningkatkan perekonomian desa secara keseluruhan, menciptakan lingkungan yang lebih sejahtera bagi seluruh komunitas Desa Ngadisari.

Sebelum dan setelah pelatihan Desa EMAS di Desa Ngadisari, ada beberapa perkembangan yang mungkin terjadi dalam ketiga profesi utama yang terkait dengan pariwisata di desa tersebut: penyewa jeep, penyedia layanan villa, dan penyewaan kuda.

Sebelum pelatihan, banyak pemilik usaha di ketiga profesi mungkin memiliki pengetahuan terbatas tentang cara memasarkan layanan mereka dengan efektif. Mereka mungkin kurang menguasai penggunaan media sosial atau pembuatan materi promosi yang berkualitas. Keterbatasan dalam penjangkauan pasar adalah masalah umum. Mungkin hanya ada sedikit informasi yang tersedia tentang layanan yang mereka tawarkan, dan kesadaran wisatawan tentang pilihan di Desa Ngadisari mungkin rendah. Sebelum pelatihan, tingkat pemesanan dan pendapatan mungkin tidak stabil. Bisnis mereka mungkin menghadapi tantangan untuk menjaga permintaan yang konsisten.

Setelah pelatihan, pemilik usaha di ketiga profesi mungkin mampu memanfaatkan media sosial dengan lebih baik. Mereka dapat menciptakan dan memelihara kehadiran online yang kuat dengan postingan berkualitas, foto-foto yang menarik, dan interaksi yang lebih aktif dengan pelanggan. Pembuatan pamflet yang efektif juga dapat membantu dalam menarik perhatian calon pelanggan. Pamflet yang menarik dan informatif dapat membantu menyampaikan berbagai pilihan layanan dengan jelas. Dengan pelatihan yang baik, pemilik usaha dapat mengalami peningkatan dalam jumlah pemesanan. Wisatawan akan lebih cenderung untuk mencari layanan mereka berdasarkan konten yang mereka lihat di media sosial atau pamflet yang mereka baca. Ini dapat menghasilkan peningkatan

pendapatan yang signifikan. Kualitas layanan yang ditingkatkan, termasuk pemasaran yang lebih baik, pembuatan pamflet yang berkualitas, dan interaksi yang lebih positif dengan pelanggan, dapat membantu membangun kepercayaan pelanggan. Ini dapat menghasilkan pelanggan yang loyal yang kembali dan merekomendasikan layanan mereka kepada orang lain.

Keseluruhan, pelatihan Desa EMAS dapat membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi penduduk desa. Penyewa jeep, penyedia villa, dan penyewaan kuda dapat mengalami peningkatan pendapatan yang signifikan. Ini dapat berdampak positif pada kehidupan sehari-hari mereka dan meningkatkan perekonomian Desa Ngadisari secara keseluruhan. Jadi, sebelum dan setelah pelatihan Desa EMAS, kita dapat mengamati perubahan yang signifikan dalam cara ketiga profesi utama terkait pariwisata beroperasi, termasuk peningkatan dalam kemampuan mereka untuk memasarkan layanan mereka, peningkatan permintaan, dan kesejahteraan ekonomi yang lebih baik. Semua ini berkontribusi pada pertumbuhan dan keberlanjutan perekonomian desa yang lebih luas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terkait Program Desa EMAS di Desa Ngadisari, kesimpulan dapat diambil bahwa program tersebut memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat setempat. Melalui inisiatif pemberdayaan ekonomi, terutama dalam konteks mata pencaharian yang bergantung pada sektor pariwisata Gunung Bromo, Program Desa EMAS mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa Ngadisari. Pembangunan infrastruktur seperti Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dan toilet umum, serta diversifikasi ekonomi melalui Desa Wisata Edelweiss dan wisata budaya, memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat. Oleh karena itu, Program Desa EMAS di Desa Ngadisari dapat dianggap berhasil dalam mencapai tujuannya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan memberikan dampak positif yang nyata dalam konteks pengembangan ekonomi lokal.

Dengan demikian pula, dapat disimpulkan bahwa peran BUMDes dan pelaksanaan program Desa EMAS telah memberikan dorongan yang sangat positif terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Ngadisari melalui sektor pariwisata. Melalui berbagai inisiatif seperti pelatihan pemasaran jasa dan pengembangan infrastruktur, masyarakat setempat kini lebih mampu

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyani, Eka, Ahmad Guspul, and Ratna Wijayanti. "Analisis Pengaruh BUMDes Dalam Menopang Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo (Studi Empiris Pada Bumdes Silatri Indah Desa Beran Dan BUMDes Skrikandi Desa Ropoh)." *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)* 1, no. 1 (2019).
- Dewi, Amalia Sri Kusuma. "Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa." *Journal of Rural and Development* 5, no. 1 (2014).
- Dewi, Sangrila Puspita. "Pengaruh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Pandansari Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi." *Sosial: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 21, no. 1 (2020).
- Eko, Sutoro. "Pemberdayaan Masyarakat Desa." In *Diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Samarinda: Badan Diklat Provinsi Kaltim, 2002.
- H.A.W, Widjaja. *Otonomi Daerah Merupakan Otonomi Yang Bulat Dan Utuh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Hartini. "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Batetangga Kab. Polman." Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2019.
- Kamaroesid, Herry. *Tata Cara Pendirian Dan Pengelolaan BUMDES*. Jakarta: Mitra Wacana media, 2015.
- Nardin, Yulianus. "Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Bumdes." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)* 8, no. 3 (2019): 140–45.
- Nasikun, J. *Mencari Suatu Strategi Pembangunan Masyarakat Desa Berparadigma Ganda, Dalam Jefta Leibo, Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta: Andi Offset, 1995.
- Nurcholis, Hanif. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemeritahan Desa*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Probolingo, Badan Pusat Statistik Kabupaten. *Kecamatan Sukapura Dalam Angka 2021*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo, 2021.
- Purbantara, Arif, and Mujiyanto. *Modul KKN Tematik Desa Membangun Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Kementrian Desa Oembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2019.

Ramadana, Coristya Berlian, and Heru Ribawanto. "KEBERADAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) SEBAGAI PENGUATAN EKONOMI DESA (Studi Di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang) Coristya." *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 1, no. 6 (2010): 1068–76.

Saniyah. "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Menurut Perspektif Ekonomi Islam." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

Sari, Adriani. "Pengaruh BUMDes Terhadap Pengembangan Ekonomi Desa Di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Begadai." Universitas Sumatera Utara, 2017.

Sekretariat RPJPN. "Indonesia EMAS 2045," 2023.

Seyadi. *Bumdes Sebagai Alternatif Lembaga Keuangan Desa*. Yogyakarta: UPP STM YKPN, 2003.

Sholihati, Nikmah. "Peran Dan Efektivitas Badan Usaha Milik Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV, 2015.

Sugiyono, D. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama, 2005.

Sumiasih, Kadek. "Peran Bumdes Dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 7, no. 4 (2018).

Suparmoko. *Ekonomi Publik: Untuk Keuangan Dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: ANDI, 2002.

Suwondo, Kutut. *Civil Society Di Aras Lokal: Perkembangan Hubungan Antara Rakyat Dan Negara Di Pedesaan Jawa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar & Percik, 2005.

Usman, Sunyoto. *Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Widjaja, HAW. *Pemerintahan Desa/Marga*. Jakarta: Raja Grafindo, 2001.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WAHYU NINGSIH QOMARIYAH
NIM : E20182062
Program Studi : Ekonomi Syariah
Jurusan : Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Instansi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sebelumnya.

Jember, 29 November 2023

Yang menyatakan

UNIVERS NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



WAHYU NINGSIH QOMARIYAH
NIM. E20182062

Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Pengaruh BumDes Melalui Program Pengembangan Desa Emas (Enterprenuer, Mandiri, Adil dan Sejahtera) terhadap masyarakat sekitar wisata Bromo, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo	Pengaruh program Desa EMAS dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Ngadisari	a. Keadaan ekonomi masyarakat di sekitar wisata Gunung Bromo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan sumber daya alam 2. Pengetahuan masyarakat 3. Pemanfaatan keberadaan pengunjung wisata Gunung Bromo 	Informan: Masyarakat yang bermatapenca harian sebagai pemilik Villa, sewa Jeep dan sewa kuda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan penelitian dengan kualitatif deskriptif 2. Lokasi di Desa Ngadisari 3. Subjek penelitian menggunakan teknik purposive 4. Teknik pengumpulan data: observasi, wawancara dan dokumentasi 5. Teknik Analisis Data: Penyajian data, kondensasi data, Penyajian data dan menarik kesimpulan. 6. Teknik Keabsahan Data: Triangulasi Sumber. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana keadaan ekonomi masyarakat Desa Ngadisari yang memanfaatkan keberadaan Wisata Gunung Bromo 2. Bagaimana paengaruh program Desa EMAS terhadap penigkatan ekonomi masyarakat Desa Ngadisari
		b. Pengaruh program Desa EMAS terhadap keadaan ekonomi masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan pengembangan profesi 2. Aplikasi sebagai hasil dari pelatihan 			



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Ahmad Yani 23 - Telpn (0335) 421440-434455
PROBOLINGGO



SURAT REKOMENDASI IZIN PENELITIAN
Nomor : 072/110/426.204/2023

Surat dari : **UIN KHAS JEMBER** Tertanggal 31 Januari 2023 Nomor : **B-141/Un.22/7.a/PP.00.9/01/2023** Perihal : **Permohonan ijin penelitian**

- Mengingat :
1. Undang-undang nomor 18 Tahun 2002 Tentang sistim Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Tknolog
 2. Peraturan Bupati Probolinggo nomor 25 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Probolinggo.
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Dengan ini menyatakan **TIDAK KEBERATAN** dilakukan Survey/Research oleh :

Nama Peneliti / Penanggung Jawab : **WAHYU NINGSIH QOMARIYAH**
NIM/NIP. : **3574044705000001**
Pekerjaan/Instansi : **mahasiswa**
Alamat : **jl. supriyadi no.14, kanigaran, kota probolinggo**
Thema/Acara Survey/Resarch : **DAMPAK PROGRAM DESA EMAS (ENTERPRENEUR, MANDIRI, ADIL DAN SEJAHTERA) TERHADAP EKONOMI MASYARAKAT SEKITAR WISATA BROMO, KECAMATAN SUKAPURA, KABUPATEN PROBOLINGGO**
Daerah / tempat dilakukan Survey / Research : **Desa NGADISARI Kec. SUKAPURA**
Lamanya Survey / Research : **14 Maret 2023 s/d 14 Juli 2023**
Pengikut peserta Survey / Research : **0 Orang**

Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Dalam jangka waktu 1 x 24 jam setelah tiba ditempat yang dituju diwajibkan, melaporkan kedatangannya kepada Pejabat setempat.
2. Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Daerah hukum Pemerintah setempat.
3. Menjaga tata tertib, keamanan, kesopanan dan kesusilaan, serta menghindari pernyataan baik dengan lisan maupun tulisan / lukisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan maupun / menghina Agama, Bangsa dan Negara dari suatu golongan penduduk.
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut diatas.
5. Setelah berakhirnya dilakukan survey / research diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat mengenai selesainya pelaksanaan survey / research sebelum meninggalkan daerah survey /Reserch.
6. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah selesai dilakukan survey / research diwajibkan memberikan laporannya secara tertulis tentang pelaksanaan dan hasil-hasilnya kepada Bupati Probolinggo Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
7. Surat keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata bahwa pemegang surat keterangan ini tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

TEMBUSAN :

1. Yth. Wakil Bupati Probolinggo (sebagai laporan)
2. Sdr. Komandan Kodim 0820
3. Sdr. Kapolres Probolinggo
4. Sdr. Forkopimka Sukapura
5. Sdr. Kepala Desa Ngadisari
6. Sdr. Wakil Dekan Akademik Universitas Islam Negeri KIAI Haji ACHMAD SIDDIQ Jember
7. Yang Bersangkutan

Probolinggo, 13 Maret 2023

**PI. KEPALA B. KESBANGPOL
KABUPATEN PROBOLINGGO**



TAUPIK ALAMI, S.SOS M.SI

Pembina Tk. I

NIP. 197001081996021001



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
KECAMATAN SUKAPURA
KEPALA DESA NGADISARI

JALAN RAYA BROMO 001 ☎ (0335) 541139
PROBOLINGGO, 67254

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

NO : 072 / 74 / 401.01 / 2023

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUNARYONO
Jabatan : Kepala Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo.

Berdasarkan Surat dari :

1. UIN KHAS :
Nomor : B.202/Un.22/5.a/PP.00.9/02/2023
Tanggal : 13 Pebruari 2023
2. Surat Keterangan untuk melakukan Survey / Research dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo
Nomor : 072/105/426.204/2023
Tanggal : 8 Maret 2023

Maka Kami memberikan rekomendasi dan Ijin Penelitian Kepada :

Nama Peneliti : Wahyu Ningsih Qomariyah
NIK : 3574044705000001
NPP : E20182062
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam

Bahwa yang tersebut diatas benar-benar telah melakukan Penelitian dalam rangka Menyusun Penelitian di Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo Jawa Timur.

Demikian Surat Pengantar Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ngadisari, 23 Mei 2023

KEPALA DESA NGADISARI
KECAMATAN SUKAPURA



SUNARYONO

JURNAL PENELITIAN

PENGARUH BUMDES MELALUI PROGRAM PENGEMBANGAN DESA EMAS (ENTERPRENEUR, MANDIRI, ADIL DAN SEJAHTERA) TERHADAP MASYARAKAT SEKITAR WISATA BROMO, KECAMATAN SUKAPURA, KABUPATEN PROBOLINGGO

No.	Hari / Tanggal	Informan	Keterangan	Tanda Tangan
1.	Selasa, 4 Februari 2023	Bapak Budi (Sekretaris Desa)	Pengenalan desa dan budaya	
2.	Senin, 20 Februari 2023	Bapak Budi (Sekretaris Desa)	Kunjungan ke salah satu tempat milik Bumdes	
3.	Kamis, 23 Februari 2023	Bapak Ahmad Tijani (Pemilik Sewa Jeep)	Wawancara omset setelah adanya Bumdes	
4.	Rabu, 8 Maret 2023	Bapak Sunaryono (Kepala Desa Ngadisari)	Wawancara rencana program pengembangan desa yang sudah ada dan tanggapan masyarakat	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangl, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: feb@uinckhas.ac.id Website: <http://uinckhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Nomor : B-75.ES/Un.22/7.d/PP.00.9/11/2023

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Wahyu Ningsih Qomariyah
NIM : E20182062
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul : Pengaruh BUMDES Melalui Program Pengembangan Desa Emas (Enterpreneur, Mandiri, Adil Dan Sejahtera) Terhadap Masyarakat Sekitar Wisata Bromo, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 30%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 29 November 2023

An. Dekan
Kepala Bagian Akademik
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Syaiful Mulyadi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>

SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Wahyu Ningsih Qomariyah
NIM : E20182062
Semester : XI (sebelas)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 30 November 2023
Koordinator Prodi. Ekonomi
Syariah,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sofiah, M.E.

